

**MOTIVASI ANGGOTA DALAM MELAKSANAKAN  
TRANSAKSI SIMPAN PINJAM DENGAN KOPERASI UNIT  
DESA (KUD) MUKTI LESTARI DIDESA KAYU ARO  
KECAMATAN KAMPAR UTARA MENURUT  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam

Pada Fakultas Syaria'ah dan Ilmu Hukum



Oleh :

**SUPRIANTO**

**10625003907**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2013**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul Motivasi Anggota Dalam Melaksanakan Transaksi Simpan Pinjam Dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Mukti Lestari di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan transaksi simpan pinjam yang dilakukan antara anggota dan koperasi unit desa (KUD), faktor-faktor penyebab pelaksanaan transaksi simpan pinjam dan bagaimana tinjauan menurut ekonomi islam.

Untuk meneliti masalah ini penulis mengambil data di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah masyarakat Desa Kayu Aro sudah menggunakan konsep ekonomi Islam yang sebenarnya.

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota koperasi unit desa yang berjumlah 243 orang, oleh karena jumlah populasi relative banyak maka penulis menetapkan sampel sebanyak 25 orang dengan teknik secara acak (*random sampling*).

Adapun sumber data yang dipakai yaitu data primer dan data sekunder, dan analisis datanya yaitu deskriptif, deduktif dan induktif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan angket, metodologi penelitian ini adalah metodologi kualitatif.

Setelah penulis menganalisis dari hasil observasi, wawancara dan angket dapat diketahui bahwa pelaksanaan transaksi simpan pinjam antara anggota dan koperasi unit desa (KUD) masih juga terdapat transaksi simpan pinjam yang tidak sesuai dengan konsep islam sebenarnya.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mempunyai pengetahuan yang luas dan sumber kebenaran semoga senantiasa kita selalu mendapatkan syafaatnya. Amin.

Alhamdulillah, rasa syukur penulis yang tidak terhingga kepada-Nya karena berkat rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “ Motivasi Anggota Dalam Melaksanakan Transaksi Simpan Pinjam Dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Mukti Lestari di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Ini merupakan hasil karya tulis yang disusun sebagai skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah banyak membantu baik berupa bimbingan, motifasi serta saran dan masukan kepada penulis sampai dengan penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Ayahanda Syarbaini dan Ibunda Ernawati yang sangat penulis cintai dan sayangi, yang tak pernah bosan memberikan nasehat dan bimbingan dan yang

tak pernah lelah untuk mencari biaya demi mencapai keberhasilan serta dengan doa tulus mereka sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, MA.M.PD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Riau.
4. Bapak Mawardi, S.Ag, M.Si, dan Bapak Darmawan Tia Indrajaya, MA, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam.
5. Bapak Hairul Amri,M.Ag, sebagai Penasehat Akademis.
6. Bapak Amrul Muzan,M.Ag, sebagai dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen dilingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Seluruh Pejabat Pemerintahan Desa Kayu Aro, para anggota koperasi yang telah memberikan informasi kepada penulis demi kelancaran penulisan skripsi ini.
9. Adik-adikku Novita Erbayanti,Erma Junita,dan Desi Hildayati, dan seluruh keluarga besar ku yang lain yang telah mendoa'kan dan memberikan motifasi untuk penulisan skripsi ini.

10. Teman-temanku, Roni, Tamrin, Rizki, Faisal, Agus, Apiz,, dan seluruh temanku EI angkatan 2006 terutama yang tak bisa ku sebut satu per satu. Dan yang sangat special Indryati yang selalu menemani dan memberi support dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat-Nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna baik dari segi isi maupun sistematika penulisannya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran serta kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya, terkandung suatu harapan semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan kepada Allah kita serahkan segala sesuatunya. Amin.....

Pekanbaru, 20 juni 2013

**SUPRIANTO**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	7
E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data .....	9
F. Metode Penulisan.....	9
G. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TUJUAN UMUM .....</b>	<b>12</b>
A. Keadaan (KUD) Mukti Lestari dan Anggota .....	12
B. Visi dan Misi (KUD) Mukti Lestari di Desa Kayu Aro.....	12
C. Kondisi Keanggotaan Koperasi .....	13
D. Program Kerja.....	22
E. Jenis Produk .....	25
<b>BAB III TELAAH PUSTAKA.....</b>	<b>31</b>
A. Pengertian Motivasi .....	31
B. Pembagian Motivasi.....	31
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Motivasi .....	32
D. Pengertian Koperasi .....	32
E. Prinsip-prinsip Koperasi .....	35
F. Fungsi dan Peran Koperasi .....	38
G. Landasan Koperasi.....	40
H. Persyaratan Pembentukan Koperasi dan Jenis Koperasi .....	42
I. Syarat Untuk Pendirian Koperasi.....	46
J. Koperasi dan Masyarakat Dalam Islam .....	58
K. Kredit dan Masalahnya .....	66
L. Prinsip Pemberian Kredit .....	68

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>71</b>
A. Motivasi Anggota Koperasi Mukti Lestari di Desa Kayu Aro Kec. Kampar Utara, dalam Melaksanakan Transaksi Simpan Pinjam (KUD) di Desa Kayu Aro .....	71
B. Faktor yang Menyebabkan Tinggi atau Rendahnya Motivasi Anggota Koperasi dalam Melaksanakan Transaksi Simpan Pinjam .....	75
C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Motivasi Pemanfaatan Dana Kredit (KUD) Mukti Lestari di Desa Kayu Aro Kec.Kampar Utara.....	78
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
 <b>LAMPRAN - LAMPIRAN</b>	

## PENDAHULUAN

## A. Latar belakang masalah

Di dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1, mengungkapkan bahwa: "perekonomian indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan". Dalam pasal ini tercantumnya dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang lebih diutamakan bukan kemakmuran perseorangan (individu). Sebab, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Didalam ajaran agama islam juga dijelaskan dan diwajibkan membantu saudara-saudara kita yang lemah atau yang sedang berada dalam kesulitan dan kesusahan. Sebagaimana firman allah dalam al-qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi

𐀀𐀁𐀂𐀃𐀄𐀅𐀆𐀇𐀈𐀉𐀊𐀋𐀌𐀍𐀎𐀏𐀐𐀑𐀒𐀓𐀔𐀕𐀖𐀗𐀘𐀙𐀚𐀛𐀜𐀝𐀞𐀟𐀠𐀡𐀢𐀣𐀤𐀥𐀦𐀧𐀨𐀩𐀪𐀫𐀬𐀭𐀮𐀯𐀰𐀱𐀲𐀳𐀴𐀵𐀶𐀷𐀸𐀹𐀺𐀻𐀼𐀽𐀾𐀿𐁀𐁁𐁂𐁃𐁄𐁅𐁆𐁇𐁈𐁉𐁊𐁋𐁌𐁍𐁎𐁏𐁐𐁑𐁒𐁓𐁔𐁕𐁖𐁗𐁘𐁙𐁚𐁛𐁜𐁝𐁞𐁟𐁠𐁡𐁢𐁣𐁤𐁥𐁦𐁧𐁨𐁩𐁪𐁫𐁬𐁭𐁮𐁯𐁰𐁱𐁲𐁳𐁴𐁵𐁶𐁷𐁸𐁹𐁺𐁻𐁼𐁽𐁾𐁿𐂀𐂁𐂂𐂃𐂄𐂅𐂆𐂇𐂈𐂉𐂊𐂋𐂌𐂍𐂎𐂏𐂐𐂑𐂒𐂓𐂔𐂕𐂖𐂗𐂘𐂙𐂚𐂛𐂜𐂝𐂞𐂟𐂠𐂡𐂢𐂣𐂤𐂥𐂦𐂧𐂨𐂩𐂪𐂫𐂬𐂭𐂮𐂯𐂰𐂱𐂲𐂳𐂴𐂵𐂶𐂷𐂸𐂹𐂺𐂻𐂼𐂽𐂾𐂿𐃀𐃁𐃂𐃃𐃄𐃅𐃆𐃇𐃈𐃉𐃊𐃋𐃌𐃍𐃎𐃏𐃐𐃑𐃒𐃓𐃔𐃕𐃖𐃗𐃘𐃙𐃚𐃛𐃜𐃝𐃞𐃟𐃠𐃡𐃢𐃣𐃤𐃥𐃦𐃧𐃨𐃩𐃪𐃫𐃬𐃭𐃮𐃯𐃰𐃱𐃲𐃳𐃴𐃵𐃶𐃷𐃸𐃹𐃺𐃻𐃼𐃽𐃾𐃿𐄀𐄁𐄂𐄃𐄄𐄅𐄆𐄇𐄈𐄉𐄊𐄋𐄌𐄍𐄎𐄏𐄐𐄑𐄒𐄓𐄔𐄕𐄖𐄗𐄘𐄙𐄚𐄛𐄜𐄝𐄞𐄟𐄠𐄡𐄢𐄣𐄤𐄥𐄦𐄧𐄨𐄩𐄪𐄫𐄬𐄭𐄮𐄯𐄰𐄱𐄲𐄳𐄴𐄵𐄶𐄷𐄸𐄹𐄺𐄻𐄼𐄽𐄾𐄿𐅀𐅁𐅂𐅃𐅄𐅅𐅆𐅇𐅈𐅉𐅊𐅋𐅌𐅍𐅎𐅏𐅐𐅑𐅒𐅓𐅔𐅕𐅖𐅗𐅘𐅙𐅚𐅛𐅜𐅝𐅞𐅟𐅠𐅡𐅢𐅣𐅤𐅥𐅦𐅧𐅨𐅩𐅪𐅫𐅬𐅭𐅮𐅯𐅰𐅱𐅲𐅳𐅴𐅵𐅶𐅷𐅸𐅹𐅺𐅻𐅼𐅽𐅾𐅿𐆀𐆁𐆂𐆃𐆄𐆅𐆆𐆇𐆈𐆉𐆊𐆋𐆌𐆍𐆎𐆏𐆐𐆑𐆒𐆓𐆔𐆕𐆖𐆗𐆘𐆙𐆚𐆛𐆜𐆝𐆞𐆟𐆠𐆡𐆢𐆣𐆤𐆥𐆦𐆧𐆨𐆩𐆪𐆫𐆬𐆭𐆮𐆯𐆰𐆱𐆲𐆳𐆴𐆵𐆶𐆷𐆸𐆹𐆺𐆻𐆼𐆽𐆾𐆿𐇀𐇁𐇂𐇃𐇄𐇅𐇆𐇇𐇈𐇉𐇊𐇋𐇌𐇍𐇎𐇏𐇐𐇑𐇒𐇓𐇔𐇕𐇖𐇗𐇘𐇙𐇚𐇛𐇜𐇝𐇞𐇟𐇠𐇡𐇢𐇣𐇤𐇥𐇦𐇧𐇨𐇩𐇪𐇫𐇬𐇭𐇮𐇯𐇰𐇱𐇲𐇳𐇴𐇵𐇶𐇷𐇸𐇹𐇺𐇻𐇼𐇽𐇾𐇿𐈀𐈁𐈂𐈃𐈄𐈅𐈆𐈇𐈈𐈉𐈊𐈋𐈌𐈍𐈎𐈏𐈐𐈑𐈒𐈓𐈔𐈕𐈖𐈗𐈘𐈙𐈚𐈛𐈜𐈝𐈞𐈟𐈠𐈡𐈢𐈣𐈤𐈥𐈦𐈧𐈨𐈩𐈪𐈫𐈬𐈭𐈮𐈯𐈰𐈱𐈲𐈳𐈴𐈵𐈶𐈷𐈸𐈹𐈺𐈻𐈼𐈽𐈾𐈿𐉀𐉁𐉂𐉃𐉄𐉅𐉆𐉇𐉈𐉉𐉊𐉋𐉌𐉍𐉎𐉏𐉐𐉑𐉒𐉓𐉔𐉕𐉖𐉗𐉘𐉙𐉚𐉛𐉜𐉝𐉞𐉟𐉠𐉡𐉢𐉣𐉤𐉥𐉦𐉧𐉨𐉩𐉪𐉫𐉬𐉭𐉮𐉯𐉰𐉱𐉲𐉳𐉴𐉵𐉶𐉷𐉸𐉹𐉺𐉻𐉼𐉽𐉾𐉿𐊀𐊁𐊂𐊃𐊄𐊅𐊆𐊇𐊈𐊉𐊊𐊋𐊌𐊍𐊎𐊏𐊐𐊑𐊒𐊓𐊔𐊕𐊖𐊗𐊘𐊙𐊚𐊛𐊜𐊝𐊞𐊟𐊠𐊡𐊢𐊣𐊤𐊥𐊦𐊧𐊨𐊩𐊪𐊫𐊬𐊭𐊮𐊯𐊰𐊱𐊲𐊳𐊴𐊵𐊶𐊷𐊸𐊹𐊺𐊻𐊼𐊽𐊾𐊿𐋀𐋁𐋂𐋃𐋄𐋅𐋆𐋇𐋈𐋉𐋊𐋋𐋌𐋍𐋎𐋏𐋐𐋑𐋒𐋓𐋔𐋕𐋖𐋗𐋘𐋙𐋚𐋛𐋜𐋝𐋞𐋟𐋠𐋡𐋢𐋣𐋤𐋥𐋦𐋧𐋨𐋩𐋪𐋫𐋬𐋭𐋮𐋯𐋰𐋱𐋲𐋳𐋴𐋵𐋶𐋷𐋸𐋹𐋺𐋻𐋼𐋽𐋾𐋿𐌀𐌁𐌂𐌃𐌄𐌅𐌆𐌇𐌈𐌉𐌊𐌋𐌌𐌍𐌎𐌏𐌐𐌑𐌒𐌓𐌔𐌕𐌖𐌗𐌘𐌙𐌚𐌛𐌜𐌝𐌞𐌟𐌠𐌡𐌢𐌣𐌤𐌥𐌦𐌧𐌨𐌩𐌪𐌫𐌬𐌭𐌮𐌯𐌰𐌱𐌲𐌳𐌴𐌵𐌶𐌷𐌸𐌹𐌺𐌻𐌼𐌽𐌾𐌿𐍀𐍁𐍂𐍃𐍄𐍅𐍆𐍇𐍈𐍉𐍊𐍋𐍌𐍍𐍎𐍏𐍐𐍑𐍒𐍓𐍔𐍕𐍖𐍗𐍘𐍙𐍚𐍛𐍜𐍝𐍞𐍟𐍠𐍡𐍢𐍣𐍤𐍥𐍦𐍧𐍨𐍩𐍪𐍫𐍬𐍭𐍮𐍯𐍰𐍱𐍲𐍳𐍴𐍵𐍶𐍷𐍸𐍹𐍺𐍻𐍼𐍽𐍾𐍿𐎀𐎁𐎂𐎃𐎄𐎅𐎆𐎇𐎈𐎉𐎊𐎋𐎌𐎍𐎎𐎏𐎐𐎑𐎒𐎓𐎔𐎕𐎖𐎗𐎘𐎙𐎚𐎛𐎜𐎝𐎞𐎟𐎠𐎡𐎢𐎣𐎤𐎥𐎦𐎧𐎨𐎩𐎪𐎫𐎬𐎭𐎮𐎯𐎰𐎱𐎲𐎳𐎴𐎵𐎶𐎷𐎸𐎹𐎺𐎻𐎼𐎽𐎾𐎿𐏀𐏁𐏂𐏃𐏄𐏅𐏆𐏇𐏈𐏉𐏊𐏋𐏌𐏍𐏎𐏏𐏐𐏑𐏒𐏓𐏔𐏕𐏖𐏗𐏘𐏙𐏚𐏛𐏜𐏝𐏞𐏟𐏠𐏡𐏢𐏣𐏤𐏥𐏦𐏧𐏨𐏩𐏪𐏫𐏬𐏭𐏮𐏯𐏰𐏱𐏲𐏳𐏴𐏵𐏶𐏷𐏸𐏹𐏺𐏻𐏼𐏽

*Artinya:” dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan*



*bertakwalah kamu kepada allah, sesungguhnya allah amat berat siksananya*”(al-maidah:2)<sup>1</sup>

Berdasarkan firman Allah diatas maka dapat diketahui bahwa semua perbuatan dan sikap hidup yang menuntungkan manusia baik secara individu maupun kelompok (seseorang/masyarakat) serta dapat melindunginya dari mara bahaya yang akan menimpa kehidupannya, sehingga layak dipandang perbuatan baik dan taqwa yang disertai dengan niat baik.

Diantara kerjasama dan hubungan manusia yang digariskan dalam al-qur'an dan hadis yang kemudian dikembangkan oleh para ulama adalah masalah perkongsian atau dalam fiqih sering disebut dengan syirkah ta'awuniah (koperasi). Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.

Untuk mencapai tujuan terciptanya kesejahteraan perekonomian, pemerintah indonesia ini menggalakkan pembangunan dibidang ekonomi kerakyatan yang disebut juga dengan kopersi. Salah satu usaha pembangunan ekonomi kerakyatan disebut adalah koperasi unit desa (KUD) yang ada didesa kayu aro kec,kampar utara.

Didesa kayu aro para kelompok atau anggota diharapkan dengan berdirinya badan usaha perekonomian dalam bidang usaha simpan pinjam

---

<sup>1</sup> Depetemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: Jumanatul Ali-ART,2004)

(kredit) yang disebut dengan istilah koperasi unit desa (KUD). Akan dapat membantu para kelompok untuk meringankan beban hidup dan kesulitan anggota atau kelompok yang kesehariannya menghabiskan waktu diperkebunan, terutama dalam persoalan menambah modal usaha.

Dimana mereka selama ini walaupun ada yang memberikan pinjaman akan tetapi bunga pinjaman terlalu tinggi sehingga sulit terjangkau pelunasannya. Oleh karena itu koperasi unit desa yang telah berdiri sejak tahun 1998 ini yang tiap tahunnya mengalami peningkatan modal baik secara intern dan ekstern sampai saat ini memiliki modal usaha sebesar Rp 283.887.353 yang tersedia untuk memberikan pinjaman kepada anggota koperasi yang membutuhkan modal tersebut.

Sampai saat ini anggota koperasi tersebut baru menampung sebanyak 243 orang baik yang aktif maupun yang tidak aktif, pinjaman yang diberikan selama ini mereka gunakan sistem ciut (kerucut) yang artinya jasa pinjaman yang dihitung dari jumlah sisa hutang yang ada pada setiap bulannya. Dengan lama jangka pinjaman maksimal sepuluh bulan. Tentunya hal ini jauh lebih mengutamakan anggota ketimbang meminjam kepada bank-bank konvensional, dikarenakan bank memberikan pinjaman (kredit) dengan menggunakan sistem bunga statis.

Disamping memberikan pinjaman kredit sebagai modal tambahan bagi anggota, pengurus juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota

yang diberikan pinjaman agar dana yang telah dipinjam kan betul-betul dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tepat guna. Tidak hanya itu saja, koperasi juga memberikan dua keuntungan kepada anggota koperasi itu sendiri, dimana ketika ia menyimpankan uangnya ke koperasi ia mendapat jasa saham (modal) yang ditanamkan ke koperasi.

Dengan demikian sudah semestinya, para anggota koperasi mukti lestari desa kayu aro, akan dapat meningkatkan usaha dan dapat pula mensejahterakan kehidupan mereka sehari-hari.

Sehingga barulah dapat dikatakan sebagai peningkatan usaha. Akan tetapi dari hasil penelitian sementara sebagai studi pendahuluan, penulis ber asumsi bahwa dana yang dipinjamkan koperasi kepda anggotanya, karena selain untuk mendirikan usaha, anggota juga menggunakan pinjaman untuk biaya kehidupan rumah tangga para anggota.

Hal ini terbukti dengan gejala-gejala yang ditemukan penulis dilapangan, diantaranya masih ada anggota yang diberikan pinjaman tetapi usahanya kurang berkembang, dan masih terdapat pula para anggota meminjam dana yang terlambat untuk membayar tunggakannya kepada koperasi pada saat jatuh tempo yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan gejala yang terjadi diatas, penulis tertarik terhadap permasalahan yang terjadi dan penulis ingin mengetahui lebih jauh lagi dengan mengadakan penelitian secara ilmiah berupa skripsi dengan judul:

**“Motivasi Anggota dalam Melaksanakan Transaksi Simpan Pinjam dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Mukti Lestari didesa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Menurut Perspektif Ekonomi Islam”.**

**B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah**

**1. Batasan masalah**

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya kemampuan, waktu dan dana yang tersedia, maka dalam penulisan ini penulis membatasi masalah yang diteliti adalah Motivasi anggota dalam melaksanakan transaksi simpan pinjam dengan Koperasi Unit Desa (KUD) mukti lestari didesa kayu aro kecamatan kampar utara menurut perspektif ekonomi islam.

**2. Rumusan masalah**

Berdasarkan batasan diatas, penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apa motivasi anggota koperasi mukti lestari didesa Kayu Aro Kec.Kampar Utara,dalam melaksanakan transaksi simpan pinjam KUD didesa Kayu Aro?
- b. Apa faktor yang menyebabkan tinggi atau rendahnya motivasi anggota koperasi dalam melaksanakan transaksi simpan pinjam?
- c. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap motivasi anggota koperasi dalam melaksanakan transaksi simpan pinjam?

## **C. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. untuk mengetahui usaha yang dilakukan petani dengan memanfaatkan pinjaman kredit KUD Mukti lestari untuk meningkatkan pendapatan.
- b. Faktor pendorong dan faktor penghambat bagi kelompok dalam meningkatkan usaha mereka dengan memanfaatkan pinjaman kredit KUD Mukti Lestari
- c. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap motivasi pemanfaatan dana kredit KUD Mukti Lestari didesa kayu aro kecamatan kampar utara.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk menambah wawasan penulis dalam pemanfaatan dana kredit dalam mendukung peningkatan usaha anggota koperasi.
- b. Sebagai bahan kajian dan informasi bagi penulis yang berkaitan dengan pemanfaatan dana kredit koperasi kelompok didesa kayu aro.
- c. sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) pada jurusan ekonomi islam fakultas syari'ah dan ilmu hukum UIN Suska Pekanbaru Riau.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di koperasi unit desa (KUD) Mukti lestari didesa Kayu Aro,Kec.Kampar Utara,Sp.5 Jl. Poros. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di KUD Mukti lestari,karena melihat selama ini realisasi pemanfaatan dana kredit dari KUD Mukti lestari tidak sesuai dengan target semula.

### **2. Subjek dan Objek penelitian**

Subjek penelitian ini adalah anggota yang menjadi anggota KUD sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah motivasi anggota dalam melaksanakan transaksi simpan pinjam dengan koperasi unit desa (KUD) Mukti lestari didesa kayu aro kecamatan kampar utara.

### **3. Populasi dan sampel**

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para anggota yang menjadi anggota (KUD) Mukti lestari yang berjumlah 243 orang. Karena jumlah populasi cukup besar artinya lebih dari dua ratus maka penulis mengambil 25 orang atau 10 % dari jumlah keseluruhan populasi yang dijadikan sebagai sampel. Teknik yang digunakan adalah random sampling (pengambilan sampel secara acak, dimana setiap populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel).

#### **4. Sumber Data**

- b. aData primer: data yang diperoleh langsung dari KUD Mukti lestari Desa kayu aro.
- b. bData Sekunder: data yang diperoleh dari riset perpustakaan dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian.

- b. Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab langsung dengan narasumber yang terdiri dari ketua,karyawan,serta anggota yang telah meminjam dana kepada KUD Mukti lestari atau responden untuk memperoleh informasi sesuai data yang diperlukan.

- c. Angket

Penulis membuat pertanyaan berupa angket yang diberikan kepada responden yang telah ditentukan akan dijadikan data primer.

### **E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data**

Metode analisa data yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Maka analisa data yang penulis gunakan adalah data deskriptif kualitatif, yaitu dimana setelah data terkumpul kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian.

### **F. Metode Penulisan**

- a. Deduktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisis dan diuraikan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu mengungkap uraian atas fakta yang diambil dari lokasi penelitian.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan



Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

- BAB II** : Tinjauan Umum KUD Mukti lestari desa kayuaro  
 Terdiri dari: Sejarah singkat Koperasi Unit Desa (KUD) Muktilestari, Visi dan Misi KUD Muktilestari desa kayu aro, Kondisi Keanggotaan Koperasi, Program Kerja, jenis produk.
- BAB III** : Pengertian Motivasi, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi Tinjauan Umum Tentang Koperasi Dan Kredit, terdiri dari: Pengertian Koperasi, Prinsip Koperasi, Fungsi Dan Peran Koperasi, Landasan Koperasi, Persyaratan Pembentukan Koperasi dan Jenis Koperasi, Koperasi dan Musyarakah Dalam Islam, Kredit dan Masalahnya, Prinsip Pemberian Kredit.
- BAB IV** : Dana Kredit Koperasi Anggota Dan Transaksi Simpan Pinjam Anggota Koperasi Mukti lestari.  
 Terdiri dari: Usaha Yang Dilakukan Anggota Koperasi Mukti Lestari diDesa Kayu Aro Dengan Memanfaatkan Pinjaman Kredit Dari KUD Mukti Lestari Untuk Meningkatkan Pendapatan, Faktor

Pendorong dan Faktor Penghambat Bagi Anggota Dalam Meningkatkan Usaha Mereka Dengan Memanfaatkan Pinjaman Kredit KUD Mukti Lestari dan Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Dana Kredit KUD Mukti Lestari.

**BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulandan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dalam penelitian ini.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM (KUD) MUKTI LESTARI**  
**KECAMATAN KAMPAR UTARA**

**A. Keadaan (KUD) Mukti Lestari dan Anggota**

Keadaan pertumbuhan jumlah Anggota (KUD) Mukti Lestari, di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara di rincikan sebagai berikut:

**TABEL I**  
**JUMLAH ANGGOTA MENURUT JENIS KELAMIN**

<b>NO.</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Laki-Laki	223 orang
2	Perempuan	20 orang
Jumlah		243 orang

*(Sumber dari buku rapat anggota tahunan KUD Mukti Lestari)<sup>1</sup>*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah anggota (KUD) Mukti Lestari, di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara menurut jenis kelamin yaitu 223 orang adalah terdiri dari laki-laki dan 20 Jiwa terdiri dari perempuan.

**B. Visi dan Misi (KUD) Mukti Lestari di Desa Kayu Aro**

**1. Visi**

- a. Menjadi pilar perekonomian nasional: pembangunan nasional akan terwujud melalui pengutan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik

---

<sup>1</sup> Rapat anggota tahunan KUD Mukti Lestari tahun 2010

sebagai pilar pendukung tegaknya kegiatan ekonomi berbasis potensi wilayah. Koperasi adalah salah satu pilar perekonomian yang perlu diperkokoh.

- b. Taat azaz: maksudnya seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Induk KUD beserta jaringannya harus mengacu pada ketentuan hukum, jatidiri koperasi, agama, dan budaya/adat-istiadat setempat. Karena itu Induk KUD menjadi pelopor pengembangan kegiatan terpercaya dan diterima oleh masyarakat setempat.
- c. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur: kegiatan Induk KUD akan memberikan manfaat ekonomi pada anggotanya dan masyarakat.

## **2. Misi**

- a. Menjadikan Induk KUD dan jaringannya sebagai pelaku usaha taat azaz, sehingga memiliki kemampuan adaptasi.
- b. Mengembangkan usaha berbasis karakteristik wilayah.
- c. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat berbasis potensi wilayah.<sup>2</sup>

## **C. Kondisi Keanggotaan Kopersi**

Keberadaan beberapa koperasi telah dirasakan peran dan manfaatnya bagi masyarakat, walaupun derajat dan intensitasnya berbeda. Setidaknya terdapat tiga

---

<sup>2</sup> Niswonger, Warren Reeve Fess, 2000, *Prinsip-prinsip Akuntansi*, Jakarta: Erlangga, Jilid 2, Edisi 19.hal.78

tingkat bentuk eksistensi koperasi bagi masyarakat (PSP-IPB, 1999) : Pertama, koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, dan kegiatan usaha tersebut diperlukan oleh masyarakat. Kegiatan usaha dimaksud dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan atau perkreditan, atau kegiatan pemasaran, atau kegiatan lain. Pada tingkatan ini biasanya koperasi menyediakan pelayanan kegiatan usaha yang tidak diberikan oleh lembaga usaha lain atau lembaga usaha lain tidak dapat melaksanakannya akibat adanya hambatan peraturan. Peran koperasi sangat dibutuhkan pelanggan karena tidak memiliki aksesibilitas pada pelanggan dari bentuk lembaga lain. Koperasi Kredit sangat berperan dalam menyediakan dana yang relative mudah bagi anggota dibandingkan meminjam di bank.

Kedua, koperasi telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain. Pada kondisi ini masyarakat telah merasakan bahwa manfaat dan peran koperasi lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain. Keterlibatan anggota (atau juga bukan anggota) dengan koperasi adalah karena pertimbangan rasional yang melihat koperasi mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Koperasi yang telah berada pada kondisi ini dinilai berada pada ‘tingkat’ yang lebih tinggi dilihat dari perannya bagi masyarakat. Beberapa KUD untuk beberapa kegiatan usaha tertentu diidentifikasi mampu memberi manfaat dan peran yang memang lebih baik dibandingkan dengan lembaga usaha lain.

Ketiga, koperasi menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya. Rasa memiliki ini dinilai telah menjadi faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit, yaitu dengan mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama koperasi menghadapi kesulitan tersebut.

Berdasarkan ketiga kondisi diatas, maka wujud peran yang diharapkan sebenarnya adalah agar koperasi dapat menjadi organisasi milik anggota sekaligus mampu menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain.

Namun diantara peran dan manfaat koperasi diatas, ternyata lebih banyak lagi koperasi, terutama KUD, yang tidak mendapatkan apresiasi dari masyarakat karena berbagai faktor. Faktor utamanya adalah ketidak mampuan koperasi menjalankan fungsi sebagai mana yang 'dijanjikan', serta banyak melakukan penyimpangan atau kegiatan lain yang mengecewakan masyarakat.

Pada masa yang akan datang, masyarakat masih membutuhkan layanan usaha koperasi. Alasan utama kebutuhan tersebut adalah dasar pemikiran ekonomi dalam konsep pendirian koperasi, seperti untuk meningkatkan kekuatan penawaran (bargaining position), peningkatan skala usaha bersama, pengadaan pelayanan yang selama ini tidak ada, serta pengembangan kegiatan lanjutan (pengolahan, pemasaran, dan sebagainya) dari kegiatan anggota. Alasan lain adalah karena adanya peluang untuk mengembangkan potensi usaha tertentu (yang tidak berkaitan dengan usaha anggota) atau karena memanfaatkan fasilitas

yang disediakan pihak lain (pemerintah) yang mensyaratkan kelembagaan koperasi, sebagaimana bentuk praktek pengembangan koperasi yang telah dilakukan selama ini.

Alasan kebutuhan awal atas keberadaan koperasi tersebut sangat dipengaruhi oleh pola hubungan koperasi dan anggota serta masyarakat yang didominasi pola hubungan bisnis. Hal ini sangat terlihat dalam pola hubungan koperasi dan anggota di KUD. Dari beberapa perkembangan Kopdit terlihat bahwa pola hubungan koperasi dan anggota yang sesuai dengan prinsip dasar koperasi memang membutuhkan proses. Namun jika kesadaran keanggotaan (yang membedakan seorang anggota dengan yang bukan anggota) telah berhasil ditumbuhkan maka kesadaran tersebut akan menjadi dasar motivasi dimana pola hubungan bisnis dapat berkesinambungan melalui partisipasi yang kemudian berkembang menjadi loyalitas. Pola yang tidak hanya 'hubungan bisnis' tersebut kemudian akan menjadi sumber kekuatan koperasi. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa Kopdit, dimana jika dalam masa krisis banyak KUD dan lembaga usaha lain gulung tikar beberapa Kopdit justru menunjukkan peningkatan kinerja baik dilihat dari omset, SHU, dan jumlah anggota.

Berdasarkan pengamatan atas banyak koperasi serta menggali aspirasi berbagai pihak yang terkait dengan perkembangan koperasi, khususnya para partisipan koperasi sendiri, yaitu anggota dan pengurus, maka dapat disintesis beberapa faktor fundamental yang menjadi dasar eksistensi dan peran koperasi

dimasyarakat. Faktor-faktor berikut merupakan faktor pembeda antara koperasi yang tetap eksis dan berkembang dengan koperasi-koperasi yang telah tidak berfungsi bahkan telah tutup.

1. Koperasi akan eksis jika terdapat kebutuhan kolektif untuk memperbaiki ekonomi secara mandiri.

Masyarakat yang sadar akan kebutuhannya untuk memperbaiki diri, meningkatkan kesejahteraannya, atau mengembangkan diri secara mandiri merupakan prasyarat bagi keberadaan koperasi. Kesadaran ini akan menjadi motivasi utama bagi pendirian koperasi 'dari bawah' atau secara 'bottom-up'. Faktor kuncinya adalah kesadaran kolektif dan kemandirian. Dengan demikian masyarakat tersebut harus pula memahami kemampuan yang ada pada diri mereka sendiri sebagai 'modal' awal untuk mengembangkan diri.

2. Koperasi akan berkembang jika terdapat kebebasan (independensi) dan otonomi untuk berorganisasi.

Koperasi pada dasarnya merupakan suatu cita-cita yang diwujudkan dalam bentuk prinsip-prinsip dasar. Wujud praktisnya, termasuk struktur organisasinya, sangat ditentukan oleh karakteristik lokal dan anggotanya. Dengan demikian format organisasi tersebut akan mencari bentuk dalam suatu proses perkembangan sedemikian sehingga akhirnya akan



diperoleh struktur organisasi, termasuk kegiatan yang akan dilakukannya, yang paling sesuai dengan kebutuhan anggota.

3. Keberadaan koperasi akan ditentukan oleh proses pengembangan pemahaman nilai-nilai koperasi.

Faktor pembeda koperasi dengan lembaga usaha lain adalah bahwa dalam koperasi terdapat nilai-nilai dan prinsip yang tidak terdapat atau tidak dikembangkan secara sadar dalam organisasi lain. Oleh sebab itu pemahaman atas nilai-nilai koperasi : keterbukaan, demokrasi, partisipasi, kemandirian, kerjasama, pendidikan, dan kepedulian pada masyarakat; seharusnya merupakan pilar utama dalam perkembangan suatu koperasi. Pada gilirannya kemudian nilai dan prinsip itulah yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan koperasi. Sehingga salah satu faktor fundamental bagi keberadaan koperasi ternyata adalah jika nilai dan prinsip koperasi tersebut dapat dipahami dan diwujudkan dalam kegiatan organisasi. Tetapi melalui suatu proses pengembangan yang berkesinambungan setahap demi setahap terutama dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi dengan tetap memberikan tempat bagi perkembangan aspirasi lokal yang spesifik menyangkut implementasi bahkan pengayaan (enrichment) dari nilai-nilai koperasi yang universal tersebut. Dengan demikian proses pengembangan pemahaman nilai-nilai koperasi akan menjadi salah satu faktor penentu keberadaan koperasi.

4. Koperasi akan semakin dirasakan peran dan manfaatnya bagi anggota dan masyarakat pada umumnya jika terdapat kesadaran dan kejelasan dalam hal keanggotaan koperasi.

Hal ini secara khusus mengacu pada pemahaman anggota dan masyarakat akan perbedaan hak dan kewajiban serta manfaat yang dapat diperoleh dengan menjadi anggota atau tidak menjadi anggota. Jika terdapat kejelasan atas keanggotaan koperasi dan manfaat yang akan diterima anggota yang tidak dapat diterima oleh non-anggota maka akan terdapat insentif untuk menjadi anggota koperasi. Pada gilirannya hal ini kemudian akan menumbuhkan kesadaran kolektif dan loyalitas anggota kepada organisasinya yang kemudian akan menjadi basis kekuatan koperasi itu sendiri.

5. Koperasi akan eksis jika mampu mengembangkan kegiatan usaha yang :
  - a. luwes (flexible) sesuai dengan kepentingan anggota,
  - b. berorientasi pada pemberian pelayanan bagi anggota,
  - c. berkembang sejalan dengan perkembangan usaha anggota
  - d. biaya transaksi antara koperasi dan anggota mampu ditekan lebih kecil dari biaya transaksi non-koperasi, dan
  - e. mampu mengembangkan modal yang ada didalam kegiatan koperasi dan anggota sendiri.

Kegiatan usaha yang dikembangkan koperasi pada prinsipnya adalah kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan anggota. Biaya transaksi yang

ditimbulkan apabila anggota menggunakan koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya juga perlu lebih kecil jika dibandingkan dengan tanpa koperasi. Hal ini akan menjadi penentu apakah keberadaan koperasi dan keanggotaan koperasi memang memberikan manfaat bisnis. Jika biaya transaksi tersebut memang dapat menjadi insentif bagi keanggotaan koperasi maka produktivitas modal koperasi akan lebih besar dibandingkan lembaga lain. Langkah selanjutnya yang perlu dikembangkan oleh suatu koperasi adalah agar hasil produktivitas tersebut dapat dipertahankan dalam sistem koperasi. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya lembaga koperasi adalah karena nilai lebih dari perputaran modal dalam “sistem” koperasi ternyata lebih banyak diterima oleh lembaga-lembaga diluar koperasi dan anggotanya. Jika koperasi memang telah menyadari pentingnya keterkaitan usaha antara usaha koperasi itu sendiri dengan usaha anggotanya, maka salah satu strategi dasar yang harus dikembangkan oleh koperasi adalah untuk mengembangkan kegiatan usaha anggota dan koperasi dalam satu kesatuan pengelolaan. Hal ini akan berimplikasi pada berbagai indikator keberhasilan usaha koperasi, dimana faktor keberhasilan usaha anggota harus menjadi salah satu indikator utama.

6. Keberadaan koperasi akan sangat ditentukan oleh kesesuaian faktor-faktor tersebut dengan karakteristik masyarakat atau anggotanya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Rizal, (1992). *Koperasi*, Penerbit Barindo, Jakarta.

Jika dilihat dari kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini, maka dapat dihipotesakan bahwa koperasi dapat tumbuh, berkembang, dan sekaligus juga berperan dan bermanfaat bagi masyarakat yang tengah berkembang dari suatu tradisional dengan ikatan sosiologis yang kuat melalui hubungan emosional primer ke arah masyarakat yang lebih heterogen dan semakin terlibat dengan sistem pasar dan kapital dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, atau yang juga dikenal dengan komunitas ‘bazar-ekonomi’. Artinya koperasi tidak diharapkan dapat sangat berkembang pada masyarakat yang masih sangat tradisional, subsisten, dan relatif ‘tertutup’ dari dinamika sistem pasar; atau juga pada komunitas yang telah menjadi sangat individualis, dan berorientasi kapital. Sebagai bagian dari identifikasi berbagai faktor fundamental tersebut maka perlu disadari bahwa pemenuhan faktor-faktor tersebut memang dapat bersifat ‘trade-off’ dengan pertimbangan kinerja jangka pendek suatu organisasi usaha konvensional. Proses yang dilakukan dalam pengembangan koperasi memang membutuhkan waktu yang lebih lama dengan berbagai faktor “non-bisnis” yang kuat pengaruhnya. Dengan demikian pemenuhan berbagai faktor fundamental, seperti pertumbuhan bisnis jangka pendek, harus dikorbankan demi untuk memperoleh kepentingan yang lebih mendasar dalam jangka panjang.

#### **D. Program Kerja**

Program Kerja didasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan. Dengan demikian program kerja tidak merupakan daftar keinginan tapi berkaitan dengan target sasaran terhadap tujuan. Program kerja KUD Mukti Lestari di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara pada tahun 2010 meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bidang Organisasi,
2. Mengaktifkan usaha dagang sesuai dengan fungsinya;
  - a. Membuat dan menyebarluaskan berbagai informasi melalui website tentang fasilitas dan aktivitas Koperasi;
  - b. Menyelenggarakan RAT tahun buku 2010 selambat-lambatnya pada bulan Maret tahun 2011;
  - c. Penyesuaian komisariat KPRI sehubungan dengan penataan status.
  - d. Menyusun rencana kegiatan seksi pengawasan berdasarkan data dan program sekretariat dan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
  - e. Memimpin dan mengkoordinasikan baawahan agar pelaksanaan tugasnya berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yanag berlaku.
  - f. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan dalam tugas sesuai dengan yang diharapkan

- g. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya
- h. Merencanakan program operasional penjabaran kebijakan teknis, memberikan bimbingan dan konsultasi di bidang usaha koperasi.

### 3. Bidang Usaha

- a. Melaksanakan pembinaan terhadap BDS (Business Development Services) dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranannya sebagai lembaga konsultan usaha bagi pengusaha kecil menengah.
- b. Melaksanakan pengembangan usaha produktif yang berkaitan dengan usaha koperasi
- c. Menggiatkan simpanan sukarela dari anggota yang dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak;
- d. Melaksanakan kegiatan pemetaan usaha koperasi.
- e. Melaksanakan kegiatan utin koperasi.
- f. Upaya relokasi kantor.
- g. Melaksanakan pengembangan usaha produktif yang berkaitan dengan usaha koperasi.

### 4. Bidang Keuangan,

- a. Memfasilitasi pengembangan permodalan koperasi.
- b. Meningkatkan iuran santunan, untuk meningkatkan pelayanan;
- c. Memperbaiki dan meningkatkan pemeliharaan kendaraan

- d. Memberi bantuan kepada lembaga atau kegiatan yang relevan dengan perkoperasian. Sedangkan besarnya bantuan bagi lembaga atau kegiatan, contoh: setinggi-tingginya Rp 150.000,- untuk intern, sedangkan untuk di luar setinggi-tingginya Rp 50.000,-
  - e. Menjalin kerja sama dengan pihak perbankan, dalam upaya peningkatan pemberian pinjaman kepada para anggota;
5. Bidang Kerjasama,
- a. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat desa kayu aro, Usaha dan Kerjasama anggota dan masyarakat
  - b. Melaksanakan promosi/pameran dan kemitraan usaha koperasi dengan pelaku usaha lainnya.
  - c. Mengembangkan jaringan usaha koperasi.
  - d. Melaksanakan kegiatan pemetaan usaha koperasi.
6. Bidang Administrasi Pembukuan, Transparansi dan Akuntabilitas,
- a. Mengadakan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.
  - b. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan koperasi.
  - c. Menghimpun dan menganalisa data hasil pembinaan sebagai bahan perencanaan dan penyusunan program pengembangan usaha koperasi.

- d. Membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan.
7. Bidang ketenagakerjaan,
- a. Mengikutsertakan Karyawan/Anggota dalam berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan/diundang mitra
  - b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota tentang website dan kewirausahaan..
  - c. Melaksanakan pembinaan terhadap BDS (Business Development Services) dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranannya sebagai lembaga konsultan usah bagi pengusaha kecil menengah.
  - d. Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara memcocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja
  - e. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier.

## **E. Jenis Produk**

### **Produk Penghimpunan Dana**

Untuk produk penghimpunan Dana pihak ke-3 (KUD) Mukti Lestari memiliki 2 jenis produk unggulan yaitu

1. Tabungan Harian



Tabungan Harian (KUD) Mukti Lestari terbagi atas 2 yaitu :

## 2. Tabungan Dana Plus

Adalah tabungan Sukarela bagi anggota maupun calon anggota yang bunganya dihitung harian dan didebet otomatis ke rekening nasabah secara otomatis setiap bulan dan setiap mencapai perolehan nisbah sampai jumlah tertentu akan mendapatkan poin. Tabungan Dana Plus ini memberikan hadiah langsung kepada nasabah dengan cara menukarkan poin-poin yang diperoleh. Tabungan ini bersifat dan berlaku secara umum dengan setoran awal Rp. 100.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 10.000,- dan dapat ditarik setiap hari dengan batas penarikan maksimal Rp.2.500.000,- per hari. Penarikan tabungan hanya dapat dilakukan 1 (satu) bulan setelah pembukaan rekening.

## 3. Simpanan Berjangka

Simpanan Berjangka (KUD) Mukti Lestari adalah bentuk simpanan berjangka berdasarkan kesepakatan antara pihak koperasi dengan nasabah baik dari segi bunga maupun jangka waktu. Keberadaan produk simpanan berjangka ini cukup membantu penyediaan dana dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan keatas dengan tingkat bunga antara 30:70 sampai dengan 65:35 dengan equivalent rate bulan sebelumnya antara 8 sampai dengan 15 % pertahun. Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,- dan Bunga Simpanan dapat tarik tunai atau melalui

pemindahbukuan serta bilyet Simpanan berjangka dapat dijadikan sebagai agunan Pembiayaan.

- a. Kepercayaan dan pengetahuan nasabah tentang Koperasi Sekarang ini masih sangat minim sehingga animo masyarakat untuk menabung maupun Simpanan berjangka pada (KUD) Mukti Lestari masih terbatas pada lingkungan karyawan dan keluarganya.
- b. Belum terlalu efektifnya upaya promosi dalam sosialisasi dan promosi kepada masyarakat umum terutama terhadap umat muslim sendiri.
- c. Masih adanya perasaan trauma terhadap Koperasi yang bermasalah.

Untuk penghimpunan dana pihak ke-3 di masa mendatang pihak (KUD) Mukti Lestari akan melakukan langkah langkah strategis dalam mensosialisasikan keunggulan ekonomi berbasis konvensional serta menunjukkan komitmen manajemen dalam menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat secara luas.

### **Strategi Pemasaran**

#### **1. Penghimpunan Dana**

Upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan upaya mempopulerkan keberadaan (KUD) Mukti Lestari di kalangan masyarakat pada berbagai lapisan yang lebih luas melalui kegiatan antara lain:

Melaksanakan penyebaran brosur melalui tempat-tempat pertemuan seperti pasar, mall dan khalayak ramai.

Melaksanakan pemasangan billboard pada tempat/jalan yang strategis. ikut serta dalam pameran dsb.

- 2) Menciptakan beberapa customer base seperti pada wilayah pasar umum, lingkungan masyarakat, instansi pemerintah dan swasta, diantaranya :

Pemukiman penduduk.

- 3) Merekrut tenaga funding yang energik dan terpercaya sebagai garda terdepan dalam penghimpunan DP-3 khususnya Simpanan.

Hal-hal yang dilakukan :

- 1) Berusaha meraih posisi kuat di bisnis perdagangan eceran dan retail dari berbagai jenis usaha mikro dan kecil.
- 2) Meningkatkan usaha-usaha pemasaran melalui cara-cara promosi yang murah dan efektif, seperti membuat brosur menarik dan praktis yang menggambarkan kemudahan pelayanan pembiayaan (KUD) Mukti Lestari.
- 3) Merekrut tenaga Pembina Nasabah yang bertugas menagih angsuran debitur harian dan mingguan sekaligus berfungsi sebagai tenaga kontroling dan pengawasan terhadap usaha debitur, disamping berfungsi sebagai marketing dalam pemasaran produk tabungan.

- 4) Terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya insani/SDI (skill dan morality) melalui pendidikan dan pelatihan baik in house training maupun out door.
- 5) Terus meningkatkan kualitas perencanaan pemasaran melalui penelitian pasar yang terencana dan terprogram.
- 6) Terus meningkatkan kualitas produk sesuai dengan tuntutan pasar namun tetap dalam kerangka ekonomi syariah.

### **Kebijakan Penempatan Dana**

Penyaluran dana dikatakan berhasil apabila pembiayaan dapat dibayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dan usaha nasabah bertambah maju. Prinsip ini menjadi dasar kebijakan penempatan dana (KUD) Mukti Lestari.

Agar penempatan dana yang dilakukan (KUD) Mukti Lestari tetap dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan azas-azas pembiayaan yang sehat, maka diatur beberapa kebijakan pembiayaan yang tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku umum.

Secara umum pemberian fasilitas pembiayaan pada (KUD) Mukti Lestari terdiri dari :

1. Pembiayaan Harian
2. Pembiayaan Mingguan

3. Pembiayaan Bulanan
4. Pembiayaan Insidentil

## **PELUANG DAN TANTANGAN**

(KUD) Mukti Lestari memiliki keunggulan komparatif dibanding Lembaga keuangan lainnya, yaitu dapat menggarap segmen pasar pada sektor mikro, kecil dan menengah.

Pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap bentuk operasional Koperasi Konvensional, adanya lembaga unit perbankan yang khusus memberi pembiayaan kepada mikro, kecil dan menengah. Masih adanya bentuk trauma masyarakat terhadap lembaga keuangan berbentuk Koperasi.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Noer Sutrisno, 2003, *Koperasi Indonesia: Potret dan Tantangan*, [http://www.ekonomi.rakyat.org/edisi\\_17/artikel\\_5.htm](http://www.ekonomi.rakyat.org/edisi_17/artikel_5.htm).

### **BAB III**

#### **TELAAH PUSTAKA**

##### **A. Pengertian Motivasi**

Motivasi (motivation) berasal dari bahasa latin yakni movere, yang berarti “menggerakkan” (to move). Ada banyak perumusan mengenai motivasi, menurut Mitchell dalam Winardi, motivasi mewakili proses-proses psikologika, yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela (volunter) yang diarahkan ke tujuan tertentu (Winardi, 2001). Setiap pimpinan perlu memahami proses-proses psikologikal apabila berkeinginan untuk membina karyawan secara berhasil dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran keorganisasian.

##### **B. Pembagian Motivasi**

Ada dua jenis motivasi:

- a) Motivasi Primer  
Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif-motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis atau jasmaniah manusia.
- b) Motivasi sekunder  
Motivasi sekunder juga terpengaruh oleh adanya sikap. Sikap adalah suatu motif yang dipelajari.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://id.shvoong.com/social-sciences/counseling/2192818-pembagian-motivasi/#ixzz0dH7nruo2>

### C. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi

Manusia dalam suatu organisasi mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena manusia bisa mengetahui masukan yang perlu diambil dari lingkungan, cara mendapatkan dan menangkap masukkan tersebut menggunakan teknologi, mampu mengolah atau mentransformasikan masukan-masukan tersebut menjadi suatu keluaran atau hasil yang berarti. Manusia menjadi penggerak dan penentu jalannya organisasi, maka perhatian dari pimpinan sangat diperlukan. Perencanaan dan pengawasan dari pimpinan sangat diperlukan dengan didukung oleh semangat kerja dari karyawan sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai pada tingkat yang optimal.<sup>2</sup>

### D. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut *Sisa Hasil Usaha* atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian laba berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh anggota.

---

<sup>2</sup><http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/02/faktor-faktor-yangmempengaruhi%20motivasi>

Selain pengertian di atas, terdapat beberapa pengertian menurut para ahli, organisasi, dan menurut undang undang dasar diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>3</sup>

### **1. Definisi menurut ILO (International Labour Organization)**

Menurut ILO di dalam definisi koperasi terdapat 6 elemen yaitu :

- a. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang
- b. Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan
- c. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai
- d. Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis
- e. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan
- f. Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang.

### **2. Definisi menurut Arifinal Chaniago**

Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

### **3. Definisi menurut P.J.V. Dooren**

There is no single definition (for cooperative) which is generally accepted, but the common principle is that cooperative union is an association of member,

---

<sup>3</sup> Arifin Sitio, 2001, *Koperasi: Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga  
Ahmad Rizal, (1992). *Koperasi*, Penerbit Barindo, Jakarta.



either personal or corporate, which have voluntarily come together in pursuit of a common economic objective. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti *"Tidak ada definisi tunggal (untuk cooperative) yang umumnya diterima, tetapi prinsip yang umum menjelaskan bahwa serikat koperasi adalah sebuah asosiasi anggota, baik pribadi atau perusahaan, yang telah secara sukarela datang bersama-sama dalam mengejar tujuan ekonomi umum"*.

#### **4. Definisi menurut Hatta ( Bapak Koperasi Indonesia )**

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan 'seorang buat semua dan semua buat seorang' .

#### **5. Definisi menurut Munkner**

Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan 'urusniaga' secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong .

#### **6. Definisi menurut UU No. 25 / 1992**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas

kekeluargaan. Dari beberapa pengertian diatas sehingga dapat kami simpulkan, bahwa **Koperasi** adalah suatu perkumpulan orang orang atau badan hukum yang tujuannya untuk kesejahteraan bersama dan didalam perkumpulan tersebut mengandung azas kekeluargaan yang saling bergotong royong dan tolong menolong diantara anggota koperasi.<sup>4</sup>

### E. Prinsip-Prinsip Koperasi

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, prinsip-prinsip koperasi adalah:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.
6. Pendidikan perkoperasian.
7. Kerjasama antar koperasi.<sup>5</sup>

Berikut ini adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip tersebut:

---

<sup>4</sup> Ahmad Rizal, (1992). *Koperasi*, Penerbit Barindo, Jakarta.

<sup>5</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, 1999: 27 .1, *Prinsip Koperasi*, Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta.

## **1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka**

Siapapun yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) koperasi dapat menjadi anggota. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk menjadi anggota. Mereka dapat dengan bebas menentukan pilihannya. Demikian juga bila hendak keluar dari koperasi, mereka dapat memutuskan sendiri, asalkan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

Sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan (diskriminasi) dalam bentuk apapun. (Penjelasan UU No. 25/1992 pasal 5 ayat 1 huruf a).<sup>6</sup>

## **2. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis**

Pengelolaan demokratis berarti :

- Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi.
- Urusan kegiatan koperasi diselenggarakan oleh pengurus.
- Pengurus dipilih dari dan oleh anggota.
- Pengurus mengangkat manajer dan karyawan atas persetujuan rapat anggota.
- Kebijakan pengurus dikontrol oleh anggota melalui pengawas.
- Laporan keuangan dan kegiatan koperasi lainnya terbuka dan transparan.
- Satu anggota satu hak suara.

---

<sup>6</sup> Niswonger, Warren Reeve Fess, 2000, *Prinsip-prinsip Akuntansi*, Jakarta: Erlangga, Jilid 2, Edisi 19.

**3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota**

- a. Bagian SHU untuk anggota, dihitung secara sebanding (proporsional) berdasarkan transaksi dan penyertaan modal (simpanan pokok dan simpanan wajib) setiap anggota pada akhir tahun buku.
- b. Transaksi anggota tercatat di koperasi.
- c. Persentase SHU yang dibagikan kepada anggota ditentukan dalam rapat anggota.

**4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal**

Modal dalam koperasi dipergunakan untuk kemanfaatan anggota, bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Karena itu, anggota memperoleh bunga yang terbatas terhadap modal. Bunganya tidak lebih dari suku bunga bank pemerintah yang lazim. Anggota memperoleh keuntungan dalam bentuk lain, seperti mengikuti pendidikan anggota dan dapat memperoleh produk dengan mudah, murah dan bermutu tinggi.

**5. Kemandirian**

Kemandirian berarti koperasi tidak bergantung pada pihak lain. Karena koperasi memiliki:

- a. Modal sendiri yang berasal dari anggota.
- b. Pengelola sendiri, yaitu pengurus yang dipilih dari dan oleh anggota.

- c. AD dan ART sendiri. Koperasi membuat AD dan ART-nya dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992.

## **6. Pendidikan Perkoperasian**

Untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan terlaksananya prinsip-prinsip koperasi, maka penting sekali anggota, pengurus dan karyawan koperasi ditingkatkan pemahaman, kesadaran dan keterampilannya melalui pendidikan. Besarnya biaya pendidikan ditetapkan oleh anggota dalam rapat anggota.

## **7. Kerjasama antar koperasi**

- a. Koperasi dapat bekerjasama dengan koperasi-koperasi lain di tingkat lokal, nasional ataupun internasional.
- b. Di Indonesia, koperasi-koperasi primer bisa membentuk pusat dan induk di tingkat regional dan nasional.

## **F. Fungsi dan Peran Koperasi**

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi di Indonesia seperti berikut ini.

- 1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial Potensi dan kemampuan ekonomi para

anggota koperasi pada umumnya relatif kecil. Melalui koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan demikian koperasi akan memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya.

2. Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat Selain diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, koperasi juga diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai wadah kerja sama ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya. Peningkatan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai koperasi jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat disekitarnya.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu maka koperasi diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan memperkuat perekonomian rakyat. Oleh karena itu koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien. Sebab

hanya dengan cara itulah koperasi dapat menjadikan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Namun koperasi mempunyai sifat-sifat khusus yang berbeda dari sifat bentuk perusahaan lainnya, maka koperasi menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Dengan demikian koperasi harus mempunyai kesungguhan untuk memiliki usaha yang sehat dan tangguh, sehingga dengan cara tersebut koperasi dapat mengemban amanat dengan baik.

#### **G. Landasan Koperasi**

1. Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah Pancasila. Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa, koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur ke-Tuhanan Yang Maha Esa,

kegotong royongan dalam arti bekerja sama, saling bantu membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

## 2. Landasan Struktural UUD 1945

Undang-undang Dasar 1945 menempatkan Koperasi pada kedudukan sebagai Soko Guru perekonomian nasional. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 ditegaskan kembali bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini sangat sesuai dengan satu fungsi dan peran koperasi, yaitu mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

## 3. Landasan mental setia kawan dan kesadaran pribadi

Koperasi merupakan organisasi yang paling banyak melibatkan peran serta rakyat. Oleh karena itu, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu lebih banyak diikutsertakan dalam upaya pembangunan, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata, tumbuh dari bawah, berakar di masyarakat dan mendapat dukungan luas dari rakyat.

## 4. Landasan operasional Pasal 33 UUD 1945, UU Koperasi No. 12 1967, UU Koperasi No. 25 1992

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa



kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Sejak tanggal 21 Oktober 1992, dasar hukum Koperasi Indonesia yang semula UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832 berubah menjadi UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini disahkan oleh Presiden RI Soeharto, dan diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116.<sup>7</sup>

#### **H. Persyaratan Pembentukan Koperasi Dan Jenis Koperasi**

Pokok- pokok proses pengesahan badan hukum koperasi

1. Dasar Hukum antara lain :
  - a. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
  - c. Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2006 yaitu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

---

<sup>7</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Jawa Barat: Kantor Wilayah Departemen Koperasi.

2. Koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang/anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.
3. Sebelum mendirikan koperasi, sebaiknya didahului dengan penyuluhan tentang perkoperasian agar kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tersebut memahami mengenai perkoperasian, sehingga anggota koperasi nantinya benar-benar memahami nilai dan prinsip koperasi dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi (Pasal 3 dan Pasal 4)
4. Proses pendirian koperasi dimulai dengan pelaksanaan Rapat Pembentukan Koperasi dimana untuk Koperasi Primer sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 orang anggota pendiri, sedangkan untuk Koperasi Sekunder sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) koperasi melalui wakil-wakilnya (Pasal 5 Ayat 1).
5. Rapat pembentukan koperasi tersebut dihadiri oleh Pejabat Dinas/Instansi/Badan Yang Membidangi Koperasi setempat sesuai domisili anggota (Pasal 5 Ayat 3), dimana kehadiran pejabat tersebut bertujuan antara lain untuk : memberi arahan berkenaan dengan pembentukan koperasi, melihat proses pelaksanaan rapat pembentukan, sebagai narasumber apabila ada pertanyaan berkaitan dengan perkoperasian dan untuk meneliti isi konsep anggaran dasar yang dibuat oleh para pendiri sebelum di”akta”kan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi setempat. Selain itu apabila memungkinkan

rapat pembentukan tersebut juga dapat dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi yaitu Notaris yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM untuk membantu membuat/menyusun akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi.

6. Dalam Rapat Pembentukan akan dibahas mengenai Anggaran Dasar Koperasi yang memuat antara lain (Pasal 5 Ayat 5) :
  - a. Nama dan tempat kedudukan
  - b. Maksud dan tujuan
  - c. Jenis koperasi dan Bidang usaha
  - d. Keanggotaan
  - e. Rapat Anggota –
  - f. Pengurus, Pengawas dan Pengelola
  - g. Permodalan, jangka waktu dan Sisa Hasil Usaha
7. Pembuatan atau penyusunan akta pendirian koperasi tersebut dapat dibuat oleh para pendiri (dalam hal di wilayah setempat tidak terdapat NPAK) atau dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (Pasal 6 Ayat 1).
8. Selanjutnya Notaris atau kuasa Pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan dilampirkan (Pasal 7 ayat (1) :
  - a. 2 (Dua) rangkap salinan akta pendirian bermeterai cukup.
  - b. Data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani Notaris.

- c. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri.
  - d. Rencana kegiatan usaha minimal tiga tahun ke depan dan RAPB.
  - e. Dokumen lain yang diperlukan sesuai peraturan perundang undangan
9. Pejabat yang berwenang akan melakukan :
- a. Penelitian terhadap materi Anggaran Dasar yang diajukan (Pasal 8 Ayat 2),
  - b. Pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut (Pasal 8 Ayat 2).
10. Apabila permohonan diterima maka pengesahan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima lengkap (Pasal 9 Ayat 2).
11. Jika permohonan ditolak maka Keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan (Pasal 12 Ayat 1).
12. Terhadap Penolakan, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut diberikan paling lambat 1 (satu) bulan (Pasal 12 Ayat 2).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Soemitro Djojohadikusumo, Badan Hukum Koperasi, Andi Offset, Yogyakarta

## **I. SYARAT UNTUK PENDIRIAN KOPERASI**

### **1. Umum**

- a. Dua rangkap Salinan Akta Pendirian koperasi dari notaris (NPAK).
- b. Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi.
- c. Daftar hadir rapat pendirian koperasi
- d. Foto Copy KTP Pendiri (urutannya disesuaikan dengan daftar hadir agar mempermudah pd saat verifikasi).
- e. Kuasa pendiri (Pengurus terpilih) untuk mengurus pengesahan pembentukan koperasi.
- f. Surat Bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang;kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi para pendiri.
- g. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi.
- h. Daftar susunan pengurus dan pengawas.
- i. Daftar Sarana Kerja Koperasi
- j. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus.
- k. Struktur Organisasi Koperasi.
- l. Surat Pernyataan Status kantor koperasi dan bukti pendukungnya

- m. Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>9</sup>

## **2. Tambahan Persyaratan Pendirian Koperasi apabila memiliki usaha Unit Simpan Pinjam (USP)**

- a. Surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian, berupa Deposito pada Bank Pemerintah atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM;
- b. Rencana Kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- c. Kelengkapan administrasi organisasi & pembukuan USP dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
- d. Nama dan Riwayat Hidup Pengurus dan Pengawas
- e. Surat Perjanjian kerja antara Pengurus koperasi dengan pengelola USP koperasi
- f. Nama dan riwayat hidup calon pengelola yang dilengkapi dengan :
  - 1) Bukti telah mengikuti pelatihan/magang usaha simpan pinjam koperasi.
  - 2) Surat keterangan berkelakuan baik
  - 3) Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan pengurus dan pengawas
  - 4) Surat Pernyataan pengelola tentang kesediaannya untuk bekerja secara purna waktu.

---

<sup>9</sup>Umar Husein, 1998, *Riset Akuntansi*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta

- g. Permohonan ijin menyelenggarakan usaha simpan pinjam
- h. Surat Pernyataan bersedia untuk diperiksa dan dinilai kesehatan USP koperasinya oleh pejabat yang berwenang
- i. Struktur Organisasi Usaha Unit Simpan Pinjam (USP)

**3. Tambahan Persyaratan Pendirian Koperasi apabila memiliki usaha Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)**

- a. Surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian, atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM cq. Ketua Koperasi
- b. Rencana kerja sekurang-kurangnya satu tahun
- c. Kelengkapan administrasi organisasi & pembukuan
- d. Keterangan pokok-pokok administrasi dan pembukuan yang didesain sesuai karakteristik lembaga keuangan syariah
- e. Nama dan riwayat hidup pengurus dan pengawas
- f. Nama Ahli syariah/Dewan Syariah yang telah mendapat rekomendasi/sertifikat dari Dewan Syariah Nasional MUI.
- g. Nama dan Riwayat Hidup Calon Pengelola yang dilengkapi dengan :
  - 1) Bukti telah mengikuti pelatihan/magang di lembaga keuangan syariah.
  - 2) Surat keterangan berkelakuan baik
  - 3) Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan pengurus dan pengawas

- h. Surat perjanjian kerja antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola Manajer/Direksi
- i. Struktur Organisasi Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah (USP)

**4. Syarat Untuk Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP)**

- a. Dua rangkap Salinan Akta Pendirian koperasi dari notaris (NPAK);
- b. Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi;
- c. Daftar hadir rapat pendirian koperasi;
- d. Foto Copy KTP Pendiri (urutannya disesuaikan dengan daftar hadir agar mempermudah pd saat verifikasi);
- e. Kuasa pendiri (Pengurus terpilih) untuk mengurus permohonan pengesahan pembentukan koperasi.;
- f. Surat Bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian KSP berupa Deposito pada Bank Pemerintah atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM, dilengkapi dgn bukti penyetoran dari anggota kepada koperasi;
- g. Rencana kerja koperasi minimal (3) tiga tahun kedepan(rencana permodalan, Neraca Awal, rencana kegiatan usaha (business plan), rencana bidang organisasi &SDM);
- h. Kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan;
- i. Daftar susunan pengurus dan pengawas;
- j. Nama dan Riwayat Hidup calon Pengelola yang dilengkapi dengan:



- 1) Bukti telah mengikuti pelatihan/magang usaha simpan pinjam koperasi.
  - 2) Surat keterangan berkelakuan baik
  - 3) Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan pengurus dan pengawas
  - 4) Surat Pernyataan pengelola tentang kesediaannya untuk bekerja secara purna waktu.
- k. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus.
  - l. Daftar sarana kerja
  - m. Permohonan izin menyelenggarakan usaha simpan pinjam
  - n. Surat Pernyataan bersedia untuk diperiksa dan dinilai kesehatan koperasinya oleh pejabat yang berwenang
  - o. Surat Pernyataan Status kantor koperasi dan bukti pendukungnya
  - p. Struktur Organisasi KSP

#### **5. Syarat untuk Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)**

- a. Dua rangkap Salinan Akta Pendirian koperasi dari notaris (NPAK);
- b. Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi;
- c. Daftar hadir rapat pendirian koperasi;
- d. Foto Copy KTP Pendiri (urutannya disesuaikan dengan daftar hadir agar mempermudah pd saat verifikasi);

- e. Kuasa pendiri (Pengurus terpilih) untuk mengurus permohonan pengesahan pembentukan koperasi.;
- f. Surat Bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian KJKS berupa Deposito pada Bank Syariah atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM cq Ketua Koperasi;
- g. Rencana kerja koperasi minimal (1) satu tahun kedepan (rencana permodalan, Neraca Awal, SOP, rencana kegiatan usaha(business plan), rencana bidang organisasi &SDM);
- h. Kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan;
- i. Keterangan pokok-pokok administrasi dan pembukuan yang didesain sesuai karakteristik lembaga keuangan syariah;
- j. Nama dan riwayat hidup pengurus dan pengawas;
- k. Nama Ahli syariah/Dewan Syariah yang telah mendapat rekomendasi/sertifikat dari Dewan Syariah Nasional MUI.
- l. Nama dan Riwayat Hidup calon Pengelola dengan melampirkan :
  - 1) bukti telah mengikuti pelatihan/magang di lembaga keuangan syariah.
  - 2) Surat keterangan berkelakuan baik
  - 3) Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan pengurus dan pengawas
- m. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus.
- n. Daftar sarana kerja

- o. Surat Pernyataan bersedia untuk diperiksa dan dinilai kesehatan koperasinya oleh pejabat yang berwenang
- p. Surat Pernyataan Status kantor koperasi dan bukti pendukungnya
- q. Struktur Organisasi KJKS

## **6. Tata Cara Pelaksanaan Serta Materi Rapat Pendirian Koperasi**

Penyusunan panitia rapat pembentukan koperasi

Susunan acara rapat pembentukan koperasi:

- a. Pembukaan oleh ketua panitia
- b. Sambutan pimpinan kantor/perusahaan atau pamong desa
- c. Sambutan dari pejabat koperasi
- d. Pemilihan pengurus dan pengawas koperasi
- e. Pengangkatan sumpah sebagai pengesahan kepengurusan koperasi
- f. Penyerahan pimpinan rapat kepada ketua terpilih
- g. Pengesahan anggaran dasar
- h. Pengesahan rencana kerja koperasi
- i. Penutup/Doa

Materi yang dibahas dalam rapat pembentukan koperasi

- a. tujuan mendirikan koperasi
- b. usaha-usaha yang hendak dijalankan
- c. penerimaan dan persyaratan anggota dan pengurus
- d. penyusutan modal dasar

- e. penetapan modal awal
- f. pemilihan pengurus dan pengawas

Pemilihan pengurus dilakukan secara demokratis dimana dalam pemilihan tersebut dilakukan tanya jawab dan dialog untuk metncapai kata sepakat. Sesuai dengan asas demokrasi, maka pengurus dan pengawas koperasi dipilih oleh rapat anggota.

Pimpinan rapat harus dapat mengarahkan sedemikian rupa sehingga dapat mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

- 1. kesepakatan pembentukan koperasi
- 2. konsep anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- 3. modal awal dan neraca awal koperasi
- 4. rencana kerja koperasi

Untuk dipilih sebagai pengurus koperasi harus memiliki berbagai persyaratan antara lain:

- 1. mampu melaksanakan tugas sebagai pengurus
- 2. bertanggung jawab terhadap segala keputusan koperasi
- 3. bersifat jujur
- 4. memiliki minat terhadap organisasi koperasi
- 5. memiliki keterampilan dan berorganisasi
- 6. memiliki jiwa wirausaha

Sedangkan calon pengawas koperasi harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. mengerti tentang administrasi pembukuan koperasi
2. mengerti tentang organisasi koperasi
3. mampu memegang rahasia terhadap pihak ketiga
4. bersifat jujur
5. mampu memberikan saran-saran terhadap perkembangan koperasi

Pengertian Anggaran Dasar Koperasi adalah : suatu peraturan tertulis yang memuat ketentuan pokok mengenai organisasi, manajemen dan kegiatan usaha koperasi dan mengatur tata kehidupan koperasi itu sendiri.

Yang harus dimuat dalam anggaran dasar koperasi :

1. Nama, pekerjaan serta tempat tinggal pendiri koperasi yang bersangkutan
2. Nama lengkap dan nama singkat koperasi yang bersangkutan.
3. Tempat kedudukan koperasi dan daerah kerjanya
4. Tujuan koperasi
5. Jenis dan kegiatan usaha yang akan dilakukan
6. Syarat-syarat keanggotaan dan kepengurusan
7. Ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban dan tugas para anggota dan para pelaksana lainnya
8. Ketentuan-ketentuan mengenai rapat-rapat anggota dan pengurus

9. Ketentuan-ketentuan mengenai simpanan, sisa hasil usaha, tanggungan anggota/koperasi dan sisa kekayaan apabila koperasi tersebut dibubarkan
10. Hal-hal lain sesuai keputusan rapat pembentukan koperasi

Kewajiban anggota koperasi :

- a. Mematuhi anggaran dasar serta keputusan yang telah disepakati anggota
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan koperasi
- c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan

Hak anggota koperasi :

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota
- b. Memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas
- c. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta atau tidak.

Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi :

- a. Rapat anggota, rapat anggota yang dihadiri oleh anggota koperasi merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi

- b. Jenis rapat anggota : RAT, rapat anggota khusus dan rapat anggota luar biasa (misalnya koperasi mengalami keadaan krisis)
- c. Pengurus koperasi, diberikan kuasa oleh anggota atau rapat anggota untuk melaksanakan kegiatan koperasi sehari-hari
- d. Pengawas, diberikan kuasa oleh anggota atau rapat anggota untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi
- e. Manager koperasi, adalah pelaksana tugas pengurus dalam memimpin koperasi sehingga mampu mencapai tujuan sesuai dengan program koperasi.

## **7. Koperasi Berdasarkan Jenisnya**

### **a. Koperasi Produksi**

Koperasi Produksi melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang. Barang-barang yang dijual di koperasi adalah hasil produksi anggota koperasi.

### **b. Koperasi konsumsi**

Koperasi Konsumsi menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang antara lain berupa: bahan makanan, pakaian, alat tulis atau peralatan rumah tangga.

### **c. Koperasi Simpan Pinjam**

Koperasi Simpan Pinjam melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan . Bagi anggota yang memerlukan dana dapat meminjam dengan memberikan jasa kepada koperasi.

d. Koperasi Serba Usaha

Koperasi Serba Usaha (KSU) terdiri atas berbagai jenis usaha. Seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota, melayani simpan.

## **8. Berdasarkan keanggotaannya**

a. Koperasi Pegawai Negeri

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah. Koperasi pegawai negeri didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri.

b. Koperasi Pasar (Koppas)

Koperasi pasar beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya pedagang di setiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan para pedagang.

c. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan (nelayan). Beberapa usaha KUD, antara lain:



- Menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit tanaman, obat pemberantas hama, dan alat-alat pertanian.
- Memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluh lapangan kepada para petani.

d. Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah beranggotakan warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah biasanya menyediakan kebutuhan warga sekolah.

## 9. Berdasarkan Tingkatannya

### a. Koperasi Primer

Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotakan orang-orang.

### b. Koperasi sekunder.

Koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi.

## J. Koperasi Dan Masyarakat Dalam Islam

Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. Bagaimana syariah melihat lembaga ini?

Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Dan, lembaga yang seperti itu sangat dipuji Islam seperti dalam firman Allah, “Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.” (Al-Maidah: 2). Lihat juga surat An-Nisa’: 12 dan Shaad: 24. Bahkan, Nabi saw. tidak sekadar membolehkan, juga memberi motivasi dengan sabdanya dalam hadits Qudsi, “Aku (Allah) merupakan pihak ketiga yang menyertai (untuk menolong dan memberkati) kemitraan antara dua pihak, selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lainnya. Jika salah satu pihak telah melakukan pengkhianatan terhadap mitranya, maka Aku keluar dari kemitraan tersebut.” (Abu Daud dan Hakim). Beliau juga bersabda, “Allah akan mengabulkan doa bagi dua orang yang bermitra selama di antara mereka tidak saling mengkhianati.” (Al-Bukhari)

Maka tak heran jika jejak koperasi berdasarkan prinsip syariah telah ada sejak abad III Hijriyah di Timur tengah dan Asia Tengah. Bahkan, secara teoritis telah dikemukakan oleh filosof Islam Al-Farabi. As-Syarakhsi dalam Al-Mabsuth, sebagaimana dinukil oleh M. Nejatullah Siddiqi dalam *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah ikut dalam suatu kemitraan usaha semacam koperasi, di antaranya dengan Sai bin Syarik di Madinah.

Kini, koperasi sebagai organisasi ekonomi berbasis orang atau keanggotaan (membership based association), menjadi substantive power perekonomian negara-negara maju. Misalnya Denmark, AS, Singapura, Korea, Jepang, Taiwan, dan Swedia. Meskipun, awalnya hanya countervailing power (kekuatan pengimbang) kapitalisme swasta di bidang ekonomi yang didominasi oleh perusahaan berdasarkan modal persahaman (equity based association), yang sering jadi sapi perah pemilik modal (share holders) dengan sistem dan mekanisme targeting yang memeras pengelola.

Spirit membership based association teraktualisasikan dalam ‘tujuh kebaikan’. Buku-buku modern menyebutnya sebagai social capital (modal sosial). Di Indonesia semangat ekonomi kerakyatan berbasis modal sosial mulai menggejala di era Hindia Belanda di abad ke-19, tepatnya sejak diberlakukan UU Agraria 1870 yang menghapuskan sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel). UU itu mendorong munculnya kepemilikan lokal (local ownership) dan inisiatif rakyat setempat yang mendapatkan porsi ekonomi yang signifikan.

Bung Hatta dalam buku Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun mengkategorikan social capital ke dalam 7 nilai sebagai spirit koperasi. Pertama, kebenaran untuk menggerakkan kepercayaan (trust). Kedua, keadilan dalam usaha bersama. Ketiga, kebaikan dan kejujuran mencapai perbaikan. Keempat, tanggung jawab dalam individualitas dan solidaritas. Kelima, paham yang sehat, cerdas, dan

tegas. Keenam, kemauan menolong diri sendiri serta menggerakkan keswasembadaan dan otoaktif. Ketujuh, kesetiaan dalam kekeluargaan.

Formula nilai yang dikemukakan Hatta ini parallel dengan apa yang diungkapkan oleh Kagawa, bapak koperasi Jepang dalam buku *Brotherhood Economics*, bahwa koperasi merupakan kemitraan ekonomi yang memacu kesejahteraan sosial bersama dan penghindaran dari isapan kekuatan-kekuatan yang meraih kedudukan istimewa dalam ekonomi.

Implementasi ketujuh nilai yang menjiwai kepribadian koperasi versi Hatta, dituangkan dalam tujuh prinsip operasional koperasi secara internal dan eksternal. Ketujuh prinsip operasional itu adalah; Pertama, keanggotaan sukarela dan terbuka. Kedua, pengendalian oleh anggota secara demokratis. Ketiga, partisipasi ekonomis anggota. Keempat, otonomi dan kebebasan. Kelima, pendidikan, pelatihan dan informasi. Keenam, kerjasama antar koperasi. Ketujuh, kepedulian terhadap komunitas.

Di Indonesia, koperasi berbasis nilai Islam lahir pertama kali dalam bentuk paguyuban usaha bernama Syarikat Dagang Islam (SDI). SDI didirikan H. Samanhudi di Solo, Jawa Tengah. Anggotanya para pedagang muslim. Mayoritas pedagang batik. Meskipun pada perkembangannya, SDI berubah menjadi Syarikat Islam yang bernuansa gerakan politik.

Dalam konteks budaya kemitraan, penelitian Afzalul Rahman yang dirilis dalam *Economic Doctrines of Islam*, koperasi tipe kemitraan modern Barat mirip

dengan kemitraan Islam. Bahkan, telah dipraktikan oleh umat Islam hingga abad 18. Baik bentuk syirkah Islam dan syirkah Modern, sama dibentuk oleh para pihak atas kesepakatan mereka sendiri untuk mencari keuntungan secara proporsional dan mutual berdasarkan hukumnegara. Menurut Rahman, persyaratan kemitraan kedua tipe koperasi tersebut sama, kecuali pada praktik riba (sistem bunga). Koperasi syar'iah (syirkah Islam) terbebas sama sekali dari unsur itu. Kemitraan Inggris (dalam hal jenis mitra, hak dan kewajibannya, fungsi dan tugasnya terhadap pihak ketiga) yang yang tertuang dalam Peraturan Kemitraan Inggris tahun 1980, kurang lebihnya sama dengan yang dijabarkan prinsip syirkah dalam kitab fikih bermadzhab Hanafi 'Al-Hidayah'.

Yang jadi soal sekarang adalah koperasi model mana yang sesuai bagi perekonomian Indonesia? Apakah koperasi yang di daasarkan pada nilai-nilai tradisional yang cenderung berpola koperasi sosial ataukah koperasi modern model Barat yang berbasis sistem pasar? Atau justru gabungan keduanya?

Tampaknya model campuran, meski tidak berlabel syari'ah, jika dalam operasionalnya berlandaskan nilai dan prinsip syari'ah, tentu lebih mendekati fitrah sunnatullah. Artinya, sesuai dengan kebutuhan, potensi, kondisi, dan norma agama serta terhindar dari ekstrimitas ekonomi dan kesalahan materialisme sosialis maupun kapitalis.

Ada 7 pantangan yang harus dihindari dalam bisnis. Dan ini harus dipegang sebagai pantangan moral bisnis (moral hazard). Pertama, maysir yaitu segala bentuk spekulasi judi (gambling) yang mematikan sektor riil dan tidak produktif. Kedua, asusila yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma social. Ketiga, goror yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Keempat, haram yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah. Kelima, riba yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran/barter lebih antar barang ribawi sejenis. Pelarangan riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, disamping menghindari praktik pemerasan, eksploitasi dan pendzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah. Keenam, ihtikar yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga. Ketujuh, berbahaya yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan maslahat dalam maqashid syari'ah.

Pemerintah dan swasta, meliputi individu maupun masyarakat, wajib mentransformasikan nilai-nilai syari'ah dalam nilai-nilai koperasi. Caranya? Mengadopsi 7 nilai syariah dalam bisnis. Pertama, shiddiq yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas. Kedua, istiqamah yang mencerminkan

konsistensi, komitmen dan loyalitas. Ketiga, tabligh yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif. Keempat, amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas. Kelima, fathanah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif. Keenam, ri'ayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, awareness. Ketujuh, mas'uliyah yang mencerminkan responsibilitas.

Koperasi syari'ah sangat strategis dalam mengembangkan sumberdaya dan mendistribusikannya secara adil. Karena, mengeluarkan harta (asset) untuk diputar, diusahakan, dan diinvestasikan secara halal adalah kewajiban syariah. Uang dan harta bukan untuk ditimbun. membuat aset nganggur (idle) sama dengan memubadzirkan nikmat Allah dan tidak mensyukurinya.

Uang dibuat untuk dipergunakan. Berpindah dari tangan ke tangan sebagai alat tukar (medium of exchange) dan pembayaran. Juga alat ekspansi dalam investasi. Jadi, semata-mata hanya alat. Tidak boleh diubah menjadi tujuan. Apalagi menjadi berhala yang disembah. “Merugikan hamba dinar, merugilah hamba dirham!” demikian sabda Rasulullah saw.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai koperasi –yang tampak dalam jatidirinya (Co-operative Identity) sebagaimana dirumuskan kongres International Co-operative Alliance (ICA) ke-100 di Manchester, Inggris, September 1995 dan disusun kembali Prof. Dr. Ian MacPherson berupa 7 nilai: menolong diri sendiri, swa tanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan, kesetiakawanan dan

kejujuran; dan 7 prinsip operasional, yaitu keanggotaan terbuka dan sukarela, pengendalian oleh anggota secara demokrasi, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kemerdekaan, pendidikan, pelatihan, dan informasi, kerjasama antar koperasi, dan kepedulian terhadap lingkungan— secara umum selaras dan serasi dengan nilai-nilai syari'ah.

Namun, jika kegiatan usahanya tidak menghindari ketujuh pantangan bisnis syari'ah, koperasi dapat kehilangan identitas (jatidinya). Koperasi harus meninggalkan praktik riba berupa penggunaan skim bunga dalam kegiatan usahanya. Tidak menetapkan bunga dalam kegiatan simpan pinjamnya. Karena, riba bertentangan dengan spirit kemitraan, keadilan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Sistem bunga tidak peduli dengan nasib debiturnya dan tidak adil dalam penetapan bunga atas pokok modal.

Syari'ah harus diterima dan diterapkan koperasi secara keseluruhan. Bukan sepotong-potong. Karena, penerapan yang sepotong-potong tidak menjamin teraktualisasikannya tujuan koperasi. (Al-Baqarah: 85)<sup>10</sup>. “Hai orang-orang yang beriman! Masuk Islamlah kamu dengan keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata.” (Al-Baqarah: 208)<sup>11</sup>. “Tuhan tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri.”

---

<sup>10</sup> Depetemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: Jumanatul Ali-ART, 2004)

<sup>11</sup> *Ibid*



Dengan teraktualisasikannya prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan ekonomi, koperasi bisa mewujudkan keadilan dan menyejahterakan bagi semua. Rahmatan lil 'alamin.

## **K. Kredit Dan Masalahnya.**

### **Masalah- Masalah yang timbul dalam koperasi Indonesia saat ini**

Koperasi di Indonesia dalam perkembangannya mengalami pasang dan surut. koperasi yang berkembang sejak jaman berdirinya koperasi indonesia sampai sekarang tidak ada yang tumbuh menjadi usaha besar yang seperti pelaku ekonomi yang besar. Padahal Berbagai paket program bantuan dari pemerintah telah diberi untuk Koperasi-koperasi di indonesia seperti kredit program: KKop, Kredit Usaha Tani (KUT), pengalihan saham (satu persen) dari perusahaan besar ke koperasi, skim program KUK dari bank dan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang merupakan kredit komersial dari perbankan, juga “paket program” dari Permodalan Nasional Madani (PNM), terus mengalir untuk memberdayakan gerakan ekonomi kerakyatan ini. Tak hanya bantuan program, ada institusi khusus yang menangani di luar Dekopin, yaitu Menteri Negara Urusan Koperasi dan PKM (Pengusaha Kecil Menengah), yang seharusnya memacu gerakan ini untuk terus maju. Adapun Masalah-masalah Koperasi Saat ini di indonesia ialah terdiri dari dua yaitu Permasalahan internal dan eksternal :

## 1. Permasalahan Internal

- a. Kebanyakan pengurus koperasi telah lanjut usia sehingga kapasitasnya terbatas;
- b. Pengurus koperasi juga tokoh dalam masyarakat, sehingga “rangkap jabatan” ini menimbulkan akibat bahwa focus perhatiannya terhadap pengelolaan koperasi berkurang sehingga kurang menyadari adanya perubahan-perubahan lingkungan;
- c. Bahwa ketidakpercayaan anggota koperasi menimbulkan kesulitan dalam memulihkannya;
- d. Oleh karena terbatasnya dana maka tidak dilakukan usaha pemeliharaan fasilitas (mesin-mesin), padahal teknologi berkembang pesat; hal ini mengakibatkan harga pokok yang relative tinggi sehingga mengurangi kekuatan bersaing koperasi;
- e. Administrasi kegiatan-kegiatan belum memenuhi standar tertentu sehingga menyediakan data untuk pengambilan keputusan tidak lengkap; demikian pula data statistis kebanyakan kurang memenuhi kebutuhan;
- f. Kebanyakan anggota kurang solidaritas untuk berkoperasi di lain pihak anggota banyak berhutang kepada koperasi;
- g. Dengan modal usaha yang relative kecil maka volume usaha terbatas; akan tetapi bila ingin memperbesar volume kegiatan, keterampilan yang dimiliki tidak mampu menanggulangi usaha besar-besaran; juga karena

insentif rendah sehingga orang tidak tergerak hatinya menjalankan usaha besar yang kompleks.

## **2. Permasalahan Eksternal**

- a. Bertambahnya persaingan dari badan usaha yang lain yang secara bebas memasuki bidang usaha yang sedang ditangani oleh koperasi;
- b. Karena dicabutnya fasilitas-fasilitas tertentu koperasi tidak dapat lagi menjalankan usahanya dengan baik, misalnya usaha penyaluran pupuk yang pada waktu lalu disalurkan oleh koperasi melalui koperta sekarang tidak lagi sehingga terpaksa mencari sendiri.
- c. Tanggapan masyarakat sendiri terhadap koperasi; karena kegagalan koperasi pada waktu yang lalu tanpa adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat yang menimbulkan ketidakpercayaan pada masyarakat tentang pengelolaan koperasi;
- d. Tingkat harga yang selalu berubah (naik) sehingga pendapatan penjualan sekarang tidak dapat dimanfaatkan untuk meneruskan usaha, justru menciutkan usaha.

## **L. Prinsip Pemberian Kredit**

Anda orang bekerja di bidang ekonomi, khususnya perbankan? Tentu anda mengenal konsep 5C, yaitu Character (karakter), Capacity (kemampuan mengembalikan utang), Collateral (jaminan), Capital (modal), dan Condition

(situasi dan kondisi). Bagi orang bank, nasabah yang memenuhi criteria 5C adalah orang yang sempurna untuk mendapatkan Pembiayaan. Bank melihat orang yang mempunyai karakter kuat, kemampuan mengembalikan uang, jaminan yang berharga, modal yang kuat, dan kondisi perekonomian yang aman bagaikan melihat sebuah mutiara. Orang seperti ini adalah nasabah potensial untuk diajak bekerja sama atau orang yang layak mendapatkan penyaluran kredit. Pendeknya orang yang mempunyai 5C yang baik adalah manusia yang ideal, menurut criteria orang bank.

Dalam dunia perbankan pertimbangan yang lazim digunakan untuk mengevaluasi calon nasabah sering disebut dengan prinsip 5C atau “*the five C’s principles*”.

Prinsip-prinsip 5C tersebut antara lain:

- a. Character adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Character ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan kata lain ini merupakan *willingness to pay*.
- b. Capacity merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha (*business record*) nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami

masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). *Capacity* ini merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar.

- c. Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity*, *return on investment*. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.
- d. Collateral adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.
- e. Condition, pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Niswonger, Warren Reeve Fess, 2000, *Prinsip-prinsip Akuntansi*, Jakarta: Erlangga, Jilid 2, Edisi 19.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Motivasi Anggota Koperasi Mukti Lestari Didesa Kayu Aro Kec.Kampar Utara,Dalam Melaksanakan Transaksi Simpan Pinjam KUD Didesa Kayu Aro.**

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandangan syariah yaitu prinsip gotong royong dan bersifat kolektif dalam membangun kemandirian mandirian hidup.

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan tentang alasan pemanfaatan produk simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam:

**TABEL II**  
**ALASAN MEMANFAATKAN PRODUK SIMPAN PINJAM**

<b>NO</b>	<b>JAWABAN RESPONDEN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PERSENTASE</b>
A	Karna anggota	25	100%
B	Karna masyarakat	-	-
C	Tidak anggota dan tidak masyarakat sekitar.	-	-
	Jumlah	25 Orang	100 %

Sumber: data olahan angket

Dari tabel diatas dapat dilihat para anggota koperasi atau responden sebanyak 25 orang mengatakan karna merasa anggota koperasi,sesuai yang di katakan yatno”dengan memanfaatkan produk simpan pinjam kami bisa menambah usaha yang ingin kami kembangkan didesa kayu aro ini.<sup>1</sup> Juga sesuai dengan perkataan tukirin”kami sangat terbantu dalam melakukan atua menambah usaha.<sup>2</sup>.

Sebagaimana para anggota koperasi yang telah melakukan transaksi simpan pinjam,banyak yang mengatakan bahwa prosesnya tidak mempersulitkan kepada anggota,sebagaimana dapat dilihat pada tabel diwah ini :

**TABEL III**  
**PROSES SIMPAN PINJAM DI (KUD) MUKTI LESTARI**

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
A	Mudah	25	100%
B	Sedang	-	-
C	Sulit	-	-
	Jumlah	25 Orang	100 %

Sumber: data olahan angket

Dari tabel diatas dapat dilihat para anggota koperasi atau responden sebanyak 25 orang mengatakan karna emang merasa terbantu dan tidak merasa dipersulit dalam mengajukan pinjaman atau permohonan peminjaman

---

<sup>1</sup> Yatno, Anggota Koperasi Mukti Lestari Desa Kayu Aro.*Wawancara*, 20 Mei 2013.

<sup>2</sup> Tukirin, Anggota Koperasi Mukti Lestari Desa Kayu Aro.*Wawancara*, 21 Mei 2013.

modal, sebagaimana telah dikatakan oleh salah satu anggota koperasi Hamsir”kami sebagai anggota sangat merasakan kemudahan proses dalam mengajukan pinjaman, dan sedikitpun kami tidak ada merasakan dipersulit oleh karyawan koperasi dalam mengajukan pinjaman.<sup>3</sup>

Para anggota koperasi mengajukan pinjaman, para anggota juga melakukan penyimpanan uang kepada koperasi Mukti Lestari, walaupun lebih banyak yang mengajukan pinjaman dari pada yang melakukan penyimpanan kepada koperasi, dan sebagaimana yang telah merasakan keuntungan atau tidaknya terhadap koperasi, bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

**TABEL IV**

**KEUNTUNGAN YANG DIRASAKAN OLEH PARA ANGGOTA  
KOPERASI DALAM PENYIMPANAN UANG KEKOPERASI**

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
A	Tinggi	-	-
B	Sedang	18	70%
C	Rendah	7	30%
	Jumlah	25 Orang	100 %

Sumber: data olahan angket

Dari tabel diatas dapat dilihat para anggota koperasi atau responden sebanyak 25 orang yang mengatakan keuntungan yang didapatkan sedang sebagaimana yang telah dikatakan oleh 18 orang atau 70%, dan ada pula dari 25

---

<sup>3</sup> Hamsir. Anggota Koperasi Mukti Lestari Desa Kayu Aro. *Wawancara*, 21 Mei 2013.



orang anggota,7 orang yang mengatakan rendah,yang mana salah seorang dari 7 responden yang mengatakan keuntungan menyimpan mengatakan,Soeroyo”mengatakan sangat rendah,karna kalau ingin menyimpan uang,kami menyimpan di bank.<sup>4</sup>

Para anggota juga merasa sangat terbantu dalam mengembalian pinjaman,karena para anggota merasa pengembalian pinjaman tersebut sangat membantu,Cuma melebihi 10% dari pinjaman yang diajukan oleh para anggota dalam 10 kali angsuran.dengan merasa terbantu tersebut para anggota tidak merasakan kesulitan dalam mengembalikan pinjaman kepada koperasi mukti lestari didesa kayu aro tersebut,sebagaimana bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

**TABEL V**  
**PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN YANG ANGGOTA**  
**LAKUKAN KEPADA (KUD) MUKTI LESTARI**

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
A	Lancar	25	100%
B	Kadang lancar kadang tidak	-	-
C	Macet	-	-
	Jumlah	25 Orang	100 %

Sumber: data olahan angket

---

<sup>4</sup> Soeroyo,anggota koperasi mukti lestari desa kayu aro.wawancara.25 mei 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat para anggota koperasi atau responden sebanyak 25 orang yang mengatakan

Lancar dalam pengembalian pinjaman,salah seorang dari anggota juga mengatakan dengan rendanya bunga pengembalian hutang pinjaman yang telah disepakati oleh pihak koperasi dan anggota,anggota sangat merasakan sangat terbantu oleh pihak koperasi,sebagaimana salah seorang dari anggota mengatakan,Suwandi”saya sebagai anggota sangat merasa terbantu dalam mengembangkan usaha,maka dari pada itu kami para anggota tidak merasakan kesulitan dalam mengembalikan pinjaman kepada (KUD) Mukti Lestari.<sup>5</sup>

## **B. Faktor Yang Menyebabkan Tinggi Atau Rendahnya Motivasi Anggota Koperasi Dalam Melaksanakan Transaksi Simpan Pinjam**

Adapun faktor yang menyebabkan tinggi atau rendahnya motivasi anggota koperasi dalam melaksanakan transaksi simpan pinjam. Pertama,

Para anggota koperasi mukti lestari tersebut juga banyak yang mengatakan,dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang mengenakan bunga yang cukup tinggi menurut para anggota,makanya kami para anggota lebih memilih mengajukan pinjaman kepada koperasi mukti lestari didesa kayu aro.sebagaimana bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

---

<sup>5</sup>Suwandi, anggota koperasi mukti lestari desa kayu aro.wawancara,27 mei 2013

**TABEL VI**  
**PANDANGAN ANGGOTA TERHADAP PRODUK SIMPAN PINJAM**  
**DIBANDINGKAN DENGAN LEMBGA KEUANGAN LAINNYA**

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
A	Lebih baik	25	100%
B	Sama	-	-
C	lebih buruk	-	-
	Jumlah	25 Orang	100 %

Sumber: data olahan angket

Dari tabel diatas dapat dilihat para anggota koperasi atau responden sebanyak 25 orang yang mengatakan atau yang mempunyai pandangan,yang mengatakan lebih baik menggunakan produk simpan pinjam kepada koperasi dibandingkan lembaga keuangan lainnya.

Para anggota juga mengatakan setelah mendapatkan dana pinjaman dari koperasi lebih banyak yang mengatakan kemajuan dalam mengembangkan usaha dari pada yang mengatakan biasa saja dalam usaha yang dikembangkannya,sebagaimana bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

**TABELVII**  
**PENDAPAT PARA ANGGOTA MELAKUKAN USAHA**  
**SETELAH MENDAPATKAN PINJAMAN**

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSentase
A	Lebih maju	21	80% %
B	biasa	4	20%
C	Lebih mundur	-	-
	Jumlah	25 Orang	100 %

Sumber: data olahan angket

Dari tabel diatas dapat dilihat para anggota koperasi atau responden sebanyak 25 orang yang mengatakan lebih banyak mengatakan lebih maju ketimbang yang mengatakan biasa saja, sebagaimana para anggota yang mengatakan biasa saja setelah mendapatkan pinjaman dari koperasi, Amrizal” saya sebagai anggota koperasi yang mengajukan pinjaman dan saya merasakan usaha yang saya kembangkan terasa biasa-saja, saya juga menyadari hal yang demikian, mungkin usaha saya tergolong baru atau belum banyak yang mengetahuinya.<sup>6</sup>

Para anggota koperasi juga banyak yang mengatakan setelah bertransaksi simpan pinjam dengan koperasi banyak yang mengatakan telah merasakan kesejahteraan dan sangat terbantu, sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

---

<sup>6</sup> Amrizal. anggota koperasi mukti lestari desa kayu aro, wawancara, 27 mei 2013

**TABEL VIII**  
**KESEJAHTERAAN YANG DIRASAKAN OLEH PARA**  
**ANGGOTA SETELAH BERTNSAKSI SIMPAN PINJAM**

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
A	Meningkat	25	100%
B	Tetap	-	-
C	Berkurang	-	-
	Jumlah	25 Orang	100 %

Sumber: data olahan angket

Dari tabel diatas dapat dilihat para anggota koperasi atau responden sebanyak 25 orang yang mengatakan atau merasakan kesejahteraan setelah bertransaksi simpan pinjam.

### **C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Motivasi Pemanfaatan Dana Kredit** **KUD Mukti Lestari Didesa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara**

Konsep utama operasional koperasi syariah adalah menggunakan akad *Syariah Mufawdhah* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.

Yang menjadi landasan dasar koperasi syariah sebagaimana lembaga ekonomi islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi islam itu sendiri

seperti tersirat tersifat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al-Qur'an. Landasan dasar Koperasi Syariah antara lain:

1. Koperasi melalui pendekatan sistem syariah yang diterangkan dalam QS. Al Baqarah:208<sup>7</sup>



Artinya, Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

2. Tujuan Sistem Syariah mensejahteraan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam diterangkan dalam QS. Al Baqarah:168,<sup>8</sup> Menerangkan tentang menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota dalam QS. Al Hujarat:13<sup>9</sup>



artinya Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

<sup>7</sup> Depetemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan, (Bandung: Jumanatul Ali-ART, 2004)

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

*mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Karakteristik dalam Koperasi Syariah adalah sebagai berikut :

- a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
- c. Berfungsi Institusi Ziswaf
- d. Mengakui mekanisme pasar yang ada.
- e. Mengakui motif mencari keuntungan
- f. Mengakui kebebasan berusaha
- g. Mengakui adanya hak bersama

Koperasi Syariah memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1. Sebagai Manajer Investasi
- 2. Sebagai Investor

Peran sebagai investor bagi koperasi syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjam dari pihak lain yang kemudian dikelola secara professional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan Koperasi syariah memiliki hak untuk dibuka kelolanyaberdasarkan program-program yang dimilikinya.

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang khusus bertujuan melayani atau mewajibkan anggotanya untuk menabung, di samping dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya.

Sebagian kalangan mendefinisikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah sebuah koperasi yang modalnya diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota koperasi. Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada para anggota koperasi dan terkadang juga dipinjamkan kepada orang lain yang bukan anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk keperluan konsumtif maupun modal usaha. Kepada setiap peminjam, koperasi simpan pinjam menarik uang administrasi setiap bulan sejumlah sekian prosen dari uang pinjaman.

Pada akhir tahun, keuntungan yang diperoleh koperasi simpan pinjam yang berasal dari uang administrasi tersebut yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan kepada anggota koperasi. Adapun jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota koperasi diperhitungkan menurut intensitas anggota yang meminjam uang dari Koperasi. Artinya, anggota yang paling sering meminjamkan uang dari Koperasi tersebut akan mendapat bagian paling banyak dari SHU, dan tidak diperhitungkan dari jumlah simpanannya, karena pada umumnya jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib dari masing-masing anggota adalah sama. ([www.kosipa.com](http://www.kosipa.com))



### **Hukum Koperasi Simpan Pinjam**

Dalam menyimpulkan hukum koperasi, tidak lepas dari praktik akad atau transaksi yang dijalankan dalam badan usaha tersebut. Dengan demikian, jika model transaksi yang dijalankan melanggar prinsip-prinsip muamalah islami, bisa dipastikan hukumnya haram. Jika dilihat dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi simpan pinjam hukumnya haram. Adapun alasannya sebagai berikut:

1. Dari sisi nama, koperasi simpan pinjam didirikan dengan tujuan orang bisa menyimpan dan meminjam uang di koperasi tersebut. Sehingga tidak tepat dan tidak boleh, jika kemudian koperasi tersebut mengambil keuntungan dari aktifitas pinjam meminjam.
2. Pinjam meminjam di dalam Islam merupakan akad tabarru' yang bertujuan untuk saling tolong menolong bukan sebagai sarana untuk mencari keuntungan.
3. Di dalam koperasi simpan pinjam terdapat unsur riba yang diharamkan dalam Islam, karena koperasi ini menarik dari setiap peminjam uang administrasi setiap bulan sejumlah sekian persen dari uang pinjaman.
4. Uang administrasi yang dibolehkan adalah uang yang memang dipakai untuk kepentingan administrasi bukan untuk mencari keuntungan, sehingga besarnya harus disesuaikan dengan biaya administrasi seperti surat-menyurat, arsip dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan di dalam pencatatan hutang.

5. Uang administrasi tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman, apalagi ditarik setiap bulan. Ini sama dengan bunga dari pinjaman alias riba. Walaupun diganti namanya dengan uang administrasi, tetapi pada hakekatnya adalah bunga dari pinjaman

### ***Beberapa Pandangan Yang Salah***

1. Ada sebagian kalangan yang ingin menghindari praktek riba dengan cara menjual formulir pinjaman yang harganya disesuaikan dengan jumlah uang yang akan dipinjam. Umpamanya, untuk pinjaman uang sebesar Rp. 100.000 formulirnya berwarna putih dengan harga Rp. 5.000 Untuk pinjaman uang sebesar Rp. 500.000 formulirnya berwarna merah dengan harga Rp. 25.000 Untuk pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 formulirnya berwarna kuning dengan harga Rp 50.000.

Kalau ingin terhindar dari riba, maka harga formulirnya harus disamakan, dan harganya tidak boleh disesuaikan dengan besar kecilnya jumlah uang pinjaman. Karena fungsi dari kertas formulir sekedar untuk memberikan keterangan tentang data-data peminjam, jadi tidak ada alasan untuk menaikkan harganya dari harga selembarnya.

2. Sebagian orang mengatakan bahwa penjualan formulir dengan harga sesuai dengan besar kecilnya pinjaman sama dengan penjualan prangko yang harganya disesuaikan dengan jenis prangko, sehingga hukumnya halal.

Dalam hal ini tidak sama antara keduanya, karena dalam penjualan prangko, tidak ada unsur pinjam meminjam, tetapi yang ada adalah akad jual beli barang, dan harga barang tersebut disesuaikan dengan kualitas dan manfaat barang. Jika kualitas dan manfaatnya lebih banyak, maka harganya lebih mahal, sebaliknya jika kualitas dan manfaatnya lebih sedikit, maka harganya lebih murah. Begitu juga dengan prangko, jika dipakai untuk mengirim surat yang lebih cepat dan jarak tempuhnya lebih jauh, tentunya harga prangkonya lebih mahal, sebaliknya jika surat yang dikirim tidak kilat dan jarak tempuhnya dekat, maka harganya tentunya lebih murah. Seperti itu juga harga tiket bis, kereta, maupun pesawat. Dan semuanya itu adalah boleh dan halal.

Adapun formulir yang harganya berbeda-beda berdasarkan jumlah pinjaman, pada hakekatnya koperasi hanya ingin mencari untung mengambil manfaat lewat hutang, dan ini diharamkan dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah shallahu ‘alahi wassalam:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةٍ فَهُوَ رِبَا

“Setiap hutang yang mengambil manfaat (komersil )adalah riba” (HR. Baihaqi)

2. Sebagian kalangan mengatakan bahwa koperasi simpan pinjam hukumnya boleh, karena pada dasarnya dalam mu’amalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Sedangkan bunga dari pinjaman anggota bukan untuk

mencari keuntungan, tetapi akan dikembalikan kepada anggota koperasi itu juga.

Bahwa dalam koperasi simpan pinjam terdapat unsur riba yang diharamkan dalam Islam. Adapun bunga pinjaman yang dibebankan kepada setiap peminjam akan kembali juga kepada anggota koperasi adalah tidak benar. Sebagai contoh, jika anggota meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000, maka dia harus mengembalikan kepada koperasi tersebut sejumlah uang yang dipinjam ditambah 5 % nya, yaitu sebesar Rp. 1.050.000 Dari tambahan 5 % tersebut, yang kembali kepada anggota tersebut hanya sekitar 3 % nya saja, sedangkan yang 2 % nya akan masuk kas koperasi. Ini menunjukkan bahwa secara nyata bahwa koperasi simpan pinjam tetap mengambil keuntungan dari aktifitas pinjam meminjam dan ini diharamkan dalam Islam, karena termasuk riba.

### ***Cara Yang Sesuai Syariat***

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar koperasi simpan pinjam sesuai syariat dan terhindar dari riba, diantaranya adalah:

1. Koperasi membeli barang-barang dari uang yang terkumpul dari anggota dan menjual barang-barang tersebut kepada para anggota atau kepada masyarakat umum. Keuntungan dari hasil penjualan dibagi kepada para anggota berdasarkan jumlah uang yang ditabung ke koperasi tersebut.

2. Koperasi ini juga bisa meminjamkan uang kepada anggota yang membutuhkan untuk keperluan konsumtif, tanpa dipungut bunga sedikitpun. Tetapi jika anggota memerlukan uang untuk keperluan usaha, maka koperasi bisa menerapkan system bagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Tetapi akad ini tidak dinamakan pinjaman, tetapi disebut dengan mudharabah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian tentang motivasi melaksanakan transaksi simpan pinjam dengan koperasi unit desa (KUD) mukti lestari didesa kayu aro kecamatan kampar utara, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Motivasi anggota koperasi mukti lestari didesa Kayu Aro Kec. Kampar Utara, dalam melaksanakan transaksi simpan pinjam KUD didesa kayu aro karena sebagai anggota, proses mendapatkan produk simpan pinjam mudah, keuntungan usaha setelah mendapatkan pinjaman, serta pengembalian yang lancar.
- b. Faktor yang menyebabkan tinggi atau rendahnya motivasi anggota koperasi dalam melaksanakan transaksi simpan pinjam, karena anggapan bahwa koperasi lebih baik, juga karena usaha lebih maju dan membutuhkan dana pinjaman, serta kesejahteraan lebih meningkat sehingga ada kelebihan uang yang dapat disimpan.
- c. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap motivasi anggota koperasi dalam melaksanakan transaksi simpan pinjam pada umumnya adalah baik, karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama anggota, hanya saja produk simpan pinjam koperasi masih konvensional sehingga perlu diperbaiki dengan system syariah.

## **B. Saran**

Melihat dari kenyataan yang terjadi di koperasi unit desa mukti lestari didesa kayu aro kecamatan kampar utara tentang pelaksanaan simpan pinjam, penulis menyarankan:

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang khusus bertujuan melayani atau mewajibkan anggotanya untuk menabung, di samping dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya.

Sebagian kalangan mendefinisikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah sebuah koperasi yang modalnya diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota koperasi. Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada para anggota koperasi dan terkadang juga dipinjamkan kepada orang lain yang bukan anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk keperluan konsumtif maupun modal usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rizal, (1992). *Koperasi*, Penerbit Barindo, Jakarta.
- Alma Wijaya, (1998). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, rineka cipta, Jakarta
- Bambang, (1997). *Manajemen Koperasi*, Penerbit BPFE-UGM, Yoyakarta
- Budiarto, (1995). *Manajemen Perkreditan*. Penerbit Liberety. Bandung
- Budi Untung, H.2000, *Perkreditan*, Andi Offset, Yogyakarta
- Chaniago 1998 : 14. *Koperasi di Indonesia*, Lembaga penerbit, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Dashlan Siamat, 1993, *Manajemen Lembaga keuangan*, Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta
- Djarot Siwidjatmo, 1992, *Koperasi Di Indonesia*, Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Djarwanto, PS. 1992, *Soal Jawab Statistik bagian Statistik Induktif*, Liberty Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 1999: 27 .1, *Prinsip Koperasi*, Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta.
- Juli Irmayanto, 1997, *Manajemen Uang dan Bank*, PT. Perlindo Jakarta
- Muchdarsyah Sinungan, 1991, *Perkoperasian*, Bina Aksara Jakarta
- Ninik Widiyanti, 1998 : 23, PT. Perlindo Jakarta
- Sudjana, 1992, *Satatistik Bandung*, Transito, Bandung
- Soemitro Djojohadikusumo, Badan Hukum Koperasi, Andi Offset, Yogyakarta
- Umar Husein, 1998, *Riset Akuntansi*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta
- Undang-Undang No. 10.1998, *Manajemen Perkreditan*. Penerbit Liberety. Bandung.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, Penerbit BPFE-UGM, Yoyakarta.
- UU No. 14 Tahun 1967, *Peraturan Perkreditan*, Lembaga Perbankan Nasional, Jakarta.